

**PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP
EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN GUBERNUR
NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK**

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian
Persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2**

**Program Studi
Magister Administrasi Publik (MAP)**

Diajukan Oleh :
Nama : R. INDRA RACHADIAN
NIRM : 2005 – 02 - 005



**PROGRAM STUDI
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL
JAKARTA
2009**

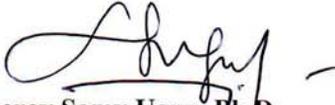
LEMBAR PENGESAHAN PENELITIAN TESIS



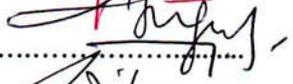
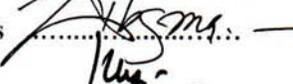
Nama Mahasiswa : **R. INDRA RACHADIAN**
NIM/NIRM : 2005-02-005/ ---
Program Studi : **MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

Telah dinyatakan lulus ujian Tesis pada tanggal 18 Maret 2009 dihadapan Pembimbing dan Penguji di bawah ini.

Pembimbing,


Leroy Samy Uguy, Ph.D.

Tim Penguji :

KETUA : **Ir. Alirahman, MSc., Ph.D** 
ANGGOTA : 1. **Ir. Yahya Rahmana Hidayat, Ph.D.** 
2. **Leroy Samy Uguy, Ph.D** 
3. **Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSis** 
4. **Dr. Husein Umar, MM. MBA** 

Jakarta, 18 Maret 2009

**UNIVERSITAS INDONUSA ESA UNGGUL
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (S-2)**

Direktur,


Ir. Alirahman, MSc., Ph.D.



PROGRAM PASCASARJANA Universitas **INDONUSA** Esa Unggul

Kampus Emas : Jl. Terusan Arjuna, Tomang Tol, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11510
Telp. : (62-21) 567-4223 (Hunting) Ext. 224, 225 & 226
Telp./Fax : (62-21) 568 2514 (direct)
Website : www.indonusa.ac.id



SURAT PERNYATAAN

Dengan surat ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Indonusa Esa Unggul maupun di Perguruan Tinggi lain. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis menjadi acuan dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku di Universitas Indonusa Esa Unggul.

Jakarta, 19 / Maret / 2009



R - INDRA. RACHADIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT bahwa berkat karunia dan ijinnya, tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana S-2 Program Pasca Sarjana Studi Magister Administrasi Publik (MAP) di Universitas INDONUSA ESA UNGGUL ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya tesis ini, penulis ingin menghaturkan terima kasih atas dukungan dan bimbingan dari dosen pembimbing yaitu Bapak Leroy S Uguy, PhD, yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan motivasi guna menyelesaikan materi tesis ini, Selain itu, ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada semua pihak dan narasumber yang telah banyak membantu dan mendukung tesis ini, yaitu :

1. Bpk Dr. Ir. ALIRAHMAN, MSc, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas INDONUSA ESA UNGGUL.
2. Bapak Dr. Ir YAHYA RACHMANA HIDAYAT, MSc, PhD, Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik.
3. Bapak DIHIN SEPTYANTO, SE.ME. Selaku Wakil Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan yang telah bersedia berdiskusi dan memberikan diskusi mengenai topik ini.
4. Para Dosen Pengajar Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik yang banyak memberikan ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi penulis kelak.
5. Staff dan Karyawan Pasca Sarjana Universitas Indonusa Esa Unggul Program Magister Administrasi Publik (MAP) yang selalu melayani dengan baik di perkuliahan serta dalam kegiatan kampus.
6. Rekan- rekan mahasiswa MAP Angkatan III, IV dan V yang telah banyak memberikan masukan dan semangat sehingga tesis ini selesai.
7. Papa dan Mama yang penulis sayangi atas dukungannya baik secara moril maupun materiil.

8. Istriku Septri Heryani, SE dan Alfath Satria Hutomo Anakku yang penulis sayangi yang menjadi inspirasi dan semangat yang tak terhingga sehingga selesainya tesis ini dengan baik
9. R. Dewi Rachmawati, SE, R. Yudi Sanjaya, R. Rio Suryaningrat, SE yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan tesis ini
10. Serta kepada pihak –pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,semoga Allah SWT,memberikan pahala atas budi baik dan bantuan yang tulus diberikan kepada penulis

Penulis sadar bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna,untuk itu penulis dengan rendah hati menerima masukan maupun kritik untuk perbaikan tesis ini.

Jakarta, Maret 2009.

Penulis.

R. Indra Rachadian.

ABSTRAKSI

R. INDRA RACHADIAN (2005-02-005) : “ PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK ”

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai Partisipasi Masyarakat Dan Persepsi Masyarakat sejauhmana pengaruhnya terhadap Efektifitas Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi liner berganda untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel dependen (partisipasi dan persepsi masyarakat) dapat menjelaskan variabel independen (efektifitas kebijakan publik). Uji hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji pengaruh variabel dependen secara parsial terhadap variabel independen. Sedangkan untuk menguji variabel independen secara simultan digunakan F test.

Hasil dari penelitian ini terbukti, terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi dan persepsi masyarakat dengan efektifitas kebijakan publik bagi perokok sebesar 0.518. Koefisien korelasi sebesar 0.518 dikategorikan kuat dengan besar sumbangan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah 51.8%. R^2 sebesar 0.268 menunjukkan pengertian bahwa sebesar 26.8% sumbangan pengaruh x_1 (partisipasi) dan x_2 (persepsi) terhadap y (efektifitas kebijakan publik), sedang sisanya 73.2% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan model regresi multiple $Y = 1.704 + 0.209 X_1 + 0.323 X_2$. Sedangkan bagi yang tidak merokok sebesar 0.880. Koefisien korelasi sebesar 0.880 dikategorikan kuat dengan besar sumbangan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah 88.0%. R^2 sebesar 0.775 menunjukkan pengertian bahwa sebesar 77.5% sumbangan pengaruh x_1 (partisipasi) dan x_2 (persepsi) terhadap y (efektifitas kebijakan publik), sedang sisanya 32.5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan model regresi multiple $Y = 0.943 + 0.217 X_1 + 0.512 X_2$.

Untuk memiliki partisipasi dan persepsi masyarakat yang tinggi, diperlukan adanya upaya-upaya pengembangan baik secara internal maupun eksternal yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna/ pengunjung kawasan dilarang merokok yang bersangkutan, sehingga dapat tercapai tujuan Pergub No. 75 Tahun 2005 dengan baik tanpa mengalami suatu kesulitan yang berarti. Dengan meningkatnya partisipasi dan persepsi masyarakat pegawai yang bersangkutan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan persepsi masyarakat yang pada akhirnya akan mempunyai dampak meningkatnya efektifitas kebijakan publik seperti yang diharapkan.

Persepsi masyarakat pada kategori tinggi hal ini perlu dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan, maka disarankan untuk memberikan pengembangan persepsi masyarakat melalui pemasangan tanda dan tulisan KAWASAN DILARANG MEROKOK yang jelas dan mudah diingat juga melalui iklan layanan masyarakat dimedia elektronik maupun cetak.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi lebih tinggi dari partisipasi maka diharapkan pemerintah agar mengalokasikan dana lebih besar untuk kegiatan peningkatkan persepsi masyarakat dibandingkan dengan partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

R. INDRA RACHADIAN (2005 - 02 005) : “ PARTICIPATION AND SOCIETY PERCEPTION TO PUBLIC POLICY EFFECTIVENESS GOVERNOR REGULATION NO. 75 YEARS 2005 ABOUT PROHIBITTING AREAS TO SMOKE ”

This research will work through that exhaustively about Society Participation And Society Perception in as much as which its influence to Governor regulation Effectiveness No. 75 Years 2005 about prohibited Areas to smoke.

Analysis who is utilized in this research is analysis liner's regression bifilar to measure how big variable dependent (participation and society perception) can word independent variable (public policy effectiveness). Hypothesis quiz is done with t test to test dependent variable influence partially to independent variable. Meanwhile to test ala independent variable simultan is utilized f test.

Result of this research is evident, available relationship which signifikan among participation and society perception with public policy effectiveness for smoker as big as 0.518. Correlation coefficient as big as 0.518 category in heavy duty with outgrows participation contribution and society perception to public policy effectiveness be 51.8%. R^2 as big as 0.268 point out that savvy as big as 26.8% x1's affecting contributions (participation) and x2 (perception) to y. (public policy effectiveness), be its rest 73.2% regarded by other factors. With multiple's regression model $y. = 1.704 + 0.209 x_1 + 0.323 X_2$. Meanwhile divides that don't smoke as big as 0.880. Correlation coefficient as big as 0.880 category in heavy duty with outgrows participation contribution and society perception to public policy effectiveness be 88.0%. R^2 as big as 0.775 point out that savvy as big as 77.5% x1's affecting contributions (participation) and x2 (perception) to y. (public policy effectiveness), be its rest 32.5% regarded by other factors. With multiple's regression model $y. = 0.943 + 0.217 x_1 + 0.512 X_2$.

To have participation and tall society perception, necessary marks sense good development efforts internally and also external who can value added give for users / area visitor prohibiting to smoke that pertinent, so gets to be reached by governor regulation No. 75 Years 2005 with every consideration without experiences a meaning handicap. At the height participation and clerk society perception that pertinent, therefore by itself will increase society perception that on eventually will have impact increases it public policy effectiveness as one is expected.

Society perception on its tall category need and even been kept needs improved, therefore suggested to give society perception development via sign assembly and AREA writing prohibiting TO SMOKE that clear and catchy also via advertising services society at electronic media and also mint.

Of research result is gotten that higher perception of participation therefore expected that government allocate greater fund for perception step-up activity society was compared with by participation society.

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------|------|
| Halaman Judul | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Lembar Pernyataan | iii |
| Prakata | iv |
| Abstrak | vi |
| Abstract | vii |
| Daftar Isi | viii |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--------------------------------------|---|
| 1.1. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.2. Identifikasi Masalah | 7 |
| 1.3. Batasan Masalah | 7 |
| 1.4. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.5. Tujuan penelitian | 8 |
| 1.6. Manfaat Penelitian | 8 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|-----------------------------------------------------|----|
| 2.1. Kajian Literatur | 10 |
| 2.1.1. Partisipasi Masyarakat | 10 |
| 2.1.2. Persepsi | 25 |
| 2.1.3. Kebijakan Publik | 28 |
| 2.2. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan | 35 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Kerangka Penelitian | 38 |
| 3.2. Hipotesis Penelitian | 41 |
| 3.3. Desain Penelitian | 41 |
| 3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel | 41 |

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| 3.4.1. Variabel Partisipasi Masyarakat | 42 |
| 3.4.2. Variabel Persepsi | 43 |
| 3.4.3. Variabel Efektifitas Kebijakan Publik | 45 |
| 3.5. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data | 44 |
| 3.5.1. Jenis Data | 44 |
| 3.5.2. Sumber Data | 47 |
| 3.6. Metode Analisis Data | 47 |

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. Analisis hasil Penelitian Berdasarkan Responden yang Merokok | 51 |
| 4.1.1. Responden berdasarkan Umur | 51 |
| 4.1.2. Responden berdasarkan jenis kelamin | 51 |
| 4.1.3. Responden berdasarkan pendidikan | 52 |
| 4.1.4. Deskripsi Data Penelitian | 53 |
| 4.1.5. Validitas | 66 |
| 4.1.6. Reliabilitas | 68 |
| 4.1.7. Uji Normalitas Data | 70 |
| 4.1.8. Uji Multikolinearitas | 71 |
| 4.1.9. Uji Heterokedasitas | 72 |
| 4.1.10. Pengujian Hipotesis | 74 |
| 4.2. Deskripsi Data Responden yang Tidak Merokok | 77 |
| 4.2.1. Responden berdasarkan Umur | 76 |
| 4.2.2. Responden berdasarkan jenis kelamin | 77 |
| 4.2.3. Responden berdasarkan pendidikan | 77 |
| 4.2.4. Validitas | 90 |
| 4.2.5. Uji Normalitas Data | 94 |
| 4.2.6. Uji Multikolinearitas | 95 |
| 4.2.7. Uji Heterokedasitas | 96 |
| 4.2.8. Pengujian Hipotesis | 97 |

| | |
|------------------------------------------------------|-----|
| 4.3. Pembahasan | 100 |
| 4.3.1. Pembahasan responden yang merokok | 100 |
| 4.3.2. Pembahasan responden yang tidak merokok | 101 |

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|-----------------------|-----|
| 5.1. Kesimpulan | 103 |
| 4.2. Saran | 104 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan pokok tesis yang intinya bermuara pada tiga hal, yaitu : topik bahasan yang diminati, topik yang dianggap penting dan dengan alasan yang spesifik untuk mengetahui apakah partisipasi dan persepsi terdapat pengaruh secara parsial dan simultan terhadap efektifitas kebijakan publik. Selanjutnya, penulisan bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

1.1. Latar Belakang.

Peraturan merokok di beberapa daerah cukup bervariasi. Ada daerah yang membuat aturan dalam bentuk surat edaran bupati/walikota/gubernur, ada pula yang dengan membuat surat keputusan (SK), tetapi tidak sedikit pula pemda atau instansi yang kurang merespon tentang larangan merokok di tempat umum. Sebelumnya beberapa peraturan tentang rokok telah dikeluarkan, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Namun demikian sampai saat ini pelaksanaannya masih belum menyentuh sasaran (para perokok) bahkan belum banyak yang tahu tentang PP tersebut. Selain kurangnya sosialisasi, masalah komitmen pimpinan diperkirakan sebagai penyebabnya.

Jika dibanding dengan negara lain, kebijakan tentang rokok di Indonesia tergolong lunak, oleh karena banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menegakkan *law enforcement*, sebut saja pertimbangan masalah lapangan pekerjaan dan penerimaan cukai. Data menunjukkan jumlah pegawai pada industri rokok kurang lebih berjumlah 2 juta orang (urutan ke-2 setelah jumlah PNS). Selain itu, 90% total penerimaan cukai di negara ini berasal dari rokok. Pada tahun 2002 penerimaan pajak negara yang berasal dari rokok sebesar 27 miliar rupiah.

Apa yang terjadi? Laporan WHO menyatakan bahwa antara tahun 1990-2001 peningkatan konsumsi rokok di Indonesia termasuk salah satu

yang paling tinggi di dunia. Indonesia menduduki posisi nomor empat terbesar, setelah Pakistan, Turki dan Bulgaria. Dilihat jumlahnya, perokok di Indonesia cukup fantastis. Hasil survey kesehatan rumah tangga (SKRT) tahun 2002 menyebutkan bahwa angka perokok aktif mencapai 75% atau sekitar 141 juta jiwa.¹

DKI Jakarta masih menjadi sentral berbagai kebijakan yang mengatur semua aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Politik pembangunan kota Jakarta, ikut mempengaruhi kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai sebuah ibukota, DKI Jakarta memiliki permasalahan yang sangat kompleks, pertumbuhan ekonomi pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, menjadikan Jakarta tumbuh dan berkembang sebagai sebuah kota yang meminggirkan kelompok rentan, seperti kelompok miskin kota.

Kebiasaan merokok menjadi sebuah gurita di tengah pertumbuhan kehidupan masyarakat modern yang serba penuh tuntutan. Dengan demikian pertumbuhan perokok pasif dan aktif tentu makin meningkat dari waktu ke waktu, yang lambat laun akan membuat para nonperokok menjadi kehilangan tempat untuk menghirup udara segar.

Sebatang rokok bak pisau bermata dua. Satu sisi melahirkan benefit bagi negara dan masyarakat, di sisi yang lain menimbulkan berbagai luka (dampak eksternalitas). Tidak hanya bagi kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan bahkan budaya. Namun, pemerintah dan masyarakat tampaknya peduli pada aspek benefitnya saja. Aspek eksternalitas rokok nyaris terlupakan.

Departemen Kesehatan, yang seharusnya menjadi pengawal dan penjaga gawang PP No 19/2003, lebih sering kebobolan dan tidak mempunyai energi untuk penegakan hukum. Setali tiga uang dengan Pemprov DKI Jakarta, ternyata semangatnya hanya setengah-setengah.

Substansi hukumnya sangat lemah. Kita tahu, PP No 19 Tahun 2003 adalah hasil revisi ketiga dari PP No 81 Tahun 1999 tentang

¹ Manajemen/Management, *Larangan Merokok Di DKI Jakarta, Kapan Daerah Lain*, Volume II/04/2004, www.desentralisasi-kesehatan.net

Penanggulangan Bahaya Rokok bagi Kesehatan. Industri rokok begitu perkasa merontokkan PP No 81/1999. Satu demi satu gigi PP No 81/1999 ditanggalkan. Ketentuan larangan total iklan rokok bagi media massa elektronik langsung digergaji dengan PP No 32 Tahun 2000. Ketentuan maksimum tar-nikotin digergaji dengan PP No 19 Tahun 2003. Praktis, secara substansi PP No 81/1999 yang bertiwikrama menjadi PP No 19/2003 sudah "dilumpuhkan" . Siapa lagi yang melumpuhkan kalau bukan industri rokok? Perda PPU demikian juga, karena hanya paraturan "cangkakan" atas penanggulangan pencemaran udara sektor transportasi.²

Proses penyadaran dan pemberdayaan publik sangat rendah. Proses sosialisasi yang dilakukan sangat formalistik, ala kadarnya dan lebih bernuansa "proyek". Kesadaran masyarakat terhadap bahaya rokok khususnya bagi perokok pasif juga belum memadai. Demikian juga budaya penghormatan terhadap tempat publik juga masih minim. Ketika merokok di tempat publik, mereka telah mengurangi fungsi tempat publik itu dan melanggar hak publik pula, yaitu hak untuk mendapatkan udara yang sehat dan bersih.

Larangan merokok di tempat umum, secara kultural belum merupakan habit positif bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat juga memerlukan teladan. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta tidak akan bisa berharap banyak atau bahkan "memaksa" masyarakat agar mematuhi Perda PPU, ketika aparat pemprov justru mempertontonkan pelanggaran di depan masyarakat. Datang saja ke kantor kelurahan/kecamatan di wilayah Jakarta, pasti masih banyak petugas kelurahan yang merokok di dalam ruangan.

Larangan merokok di tempat umum merupakan bentuk investasi pemprov DKI dalam rangka meningkatkan kesehatan dan produktivitas. Udara bersih dan bebas asap rokok mengurangi penyakit yang diakibatkan karena merokok seperti kanker paruparu. Masyarakat yang sehat sudah barang tentu produktivitas akan meningkat dibanding mereka yang keluar masuk rumah sakit karena merokok. Di Indonesia, setiap tahun terdapat 57

² Suara Pembaharuan, *Lumpuh, Larangan Merokok di Tempat Umum*, 31 Mei 2007

ribu orang meninggal karena menderita penyakit yang disebabkan asap rokok seperti jantung, paru-paru, kanker tenggorokan/mulut dan stroke. Mungkin pendapatan cukai yang tinggi juga tidak sebanding dengan biaya yang harus ditanggung pemerintah dan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan. Dari sisi ekonomi, kalau mereka rata-rata merokok sebungkus sehari, maka setiap hari Indonesia membakar uang sekitar Rp 500 miliar. Secara makro kerugian keuangan masyarakat pada tahun 2001 sekitar Rp 54,1 triliun. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mulai memikirkan bahwa industri rokok bukanlah jalan keluar untuk memenuhi pendapatan negara, tetapi kebijakan yang diambil sudah menjadi keharusan untuk melindungi masyarakat.

Terlepas dari tidak berdayanya kedua aturan itu, situasi di negeri ini memang "kacau". Ketika negeri lain begitu getol menanggulangi dampak tembakau bagi kesehatan, negeri ini justru makin kuat menyandang gelar "negeri keranjang sampah nikotin". Ke depan, PP No 19/2003 dan Perda PPU tidak akan mengalami perbaikan nasib secara signifikan, bahkan bisa jadi akan makin terpuruk. Gerakan industri rokok dan konco-konco dekatnya begitu liar mengepung semua penjuru mata angin. Jangankan hanya berupa PP dan Perda, peraturan dan kebijakan yang lebih tinggi pun mudah ditendangnya.

Di provinsi DKI Jakarta ada perda / peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2005 yang melarang merokok di tempat umum dengan sanksi yang cukup berat, yakni kurungan badan selama 6 bulan di penjara atau denda uang sebesar Rp. 50.000.000,- / lima puluh juta rupiah. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah banyak warga masyarakat yang merupakan perokok aktif banyak yang merokok di tempat-tempat yang termasuk dalam kategori kawasan dilarang merokok. Walaupun sudah ada tempat khusus merokok bagi para perokok, terkadang masih banyak orang yang merokok

seenaknya sendiri tanpa menghiraukan kenyamanan dan kesehatan orang lain.³

Merokok sangat merugikan kesehatan baik manusia maupun hewan karena mengandung racun yang sangat berbahaya. Orang yang merokok biasanya memiliki paru-paru yang busuk dan berwarna gelap, sangat berbeda dengan orang yang tidak menghisap batang rokok. Merokok adalah haram hukumnya dalam agama karena tidak ada dampak positif dari rokok, yang ada hanya efek negatifnya saja, sehingga merokok itu adalah perbuatan dosa. Perokok juga termasuk dalam kegiatan yang boros, karena seseorang bisa menghabiskan ratusan ribu hingga jutaan rupiah per bulan untuk membeli bungkus-bungkus rokok. Kasihan dan menyedihkan sekali bagi pecandu rokok yang memiliki penghasilan kecil, karena dipaksa untuk membeli rokok akibat kecanduan. Anak dan istri pun jadi terkena imbas karena untuk makan, sekolah, rumah, bayar tagihan listrik, dsb kurang mencukupi.

Pemerintah dinilai belum serius melindungi warga dari bahaya asap rokok. Padahal, sebanyak 1.172 orang di Indonesia meninggal setiap hari karena tembakau.⁴

Hal itu diungkapkan Dr Hakim Sorimuda Pohan, Wakil Ketua Forum Parlemen Indonesia, dalam konferensi pers pemaparan hasil poling mengenai opini masyarakat Indonesia terhadap Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) di Gedung Nusantara 3 DPR. Ia mengatakan, Indonesia belum meratifikasi FCTC dan sampai sekarang belum ada undang-undang khusus yang mengatur pembatasan rokok.

Dalam poling tersebut sebanyak 68 persen masyarakat Indonesia percaya bahwa menghirup asap rokok orang lain dapat mengancam kesehatan orang yang tidak merokok. Mayoritas penduduk juga mendukung larangan merokok di ruang publik lainnya, seperti di restoran (81 persen), dan tempat publik seperti lokasi perbelanjaan, terminal bus, dan stasiun

³ [godam64](#), Meningkatkan Pendapatan Daerah Dengan Perda Larangan Merokok Di Tempat Umum

⁴ TPGIMAGES, Survei: 99 Persen Setuju Larangan Merokok di Tempat Umum.

kereta api (75 persen). Bahkan, 99 persen masyarakat Indonesia mendukung larangan merokok di rumah sakit dan klinik serta di perkantoran dan ruang kerja tertutup. Sebanyak 96 persen juga mendukung larangan penjualan rokok pada anak di bawah usia 18 tahun.

Survei tersebut dilakukan kepada 1.200 responden yang dipilih secara acak di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pengambilan data yang dilakukan QUIRK Global strategies itu diklaim mewakili 90 persen total populasi, dengan *sampel error* 2,8 persen dan tingkat keyakinan 95 persen.⁵

"Dengan hasil *polling* ini menunjukkan bahwa orang Indonesia mendukung UU pengendalian tembakau yang lebih tegas," ujar Hakim. Ia mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang belum meratifikasi FCTC.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai negara Republik Indonesia adalah menyehatkan kehidupan bangsa. Hal ini merupakan suatu tujuan yang amat penting karena sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dengan dicantumkannya tujuan tersebut dalam konstitusi negara, maka pihak yang paling bertanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut adalah lembaga-lembaga penyelenggara negara. Kenyataan tersebut harus disadari oleh seluruh lembaga-lembaga aparatur negara sehingga produk-produk hukum yang mereka buat mutlak harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya serta berusaha meningkatkannya dengan baik.

Dengan demikian penyelenggara pemerintahan daerah dengan DPRD-nya mutlak harus membangun kerangka acuan dalam mencapai tujuan diatas melalui strategi yang sesuai dengan pola masyarakat setempat.

Betapapun baiknya kinerja lembaga pemerintahan, maka tujuan ini mustahil dapat dicapai jika tidak mendapat dukungan dari masyarakatnya. Hal ini cukup berlawanan karena masyarakat adalah subyek dari pembangunan itu sendiri sehingga kebijakan-kebijakan yang telah diformulasikan oleh kedua lembaga diatas hanya dapat direalisasikan dengan baik melalui dukungan masyarakat. Dengan demikian

⁵ *Ibid*

salah satu syarat untuk mempercepat pencapaian tersebut adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala sektor yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan daerah. Maka Tesis ini diberi judul **“PARTISIPASI DAN PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PUBLIK PERATURAN GUBERNUR NO. 75 TAHUN 2005 TENTANG KAWASAN DILARANG MEROKOK”**

1.2. Identifikasi Masalah.

Berkenaan dengan hal tersebut maka indentifikasi masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik khususnya Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.
2. Kurangnya kedisiplinan seperti para pegawai instansi yang tetap merokok disembarang tempat meskipun telah disediakan tempat khusus bagi perokok.
3. Banyaknya para perokok yang masih merokok di tempat layanan umum.
4. Tingginya volume perokok yang merokok di kawasan dilarang merokok.
5. Kurangnya penegakan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok.
6. Rendahnya persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik khususnya Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

1.3. Batasan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas dan mengingat luasnya ruang lingkup masalah yang dihadapi maka, penelitian ini hanya akan mengungkapkan :

1. Partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di Jakarta Barat?

2. Partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di Jakarta Barat?

1.4. Rumusan Masalah.

Sesuai dengan uraian dan bahasan pada latar belakang penelitian, maka dapat diajukan rumusan masalah-masalahnya sebagai berikut :

3. Apakah partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di Jakarta Barat?
4. Apakah partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di Jakarta Barat?

1.5. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan perumusan masalah diatas maka, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di Jakarta Barat.
2. Untuk mengetahui partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok di Jakarta Barat.

1.6. Manfaat Penelitian.

Dari tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka diharapkan penelitian ini akan bermanfaat, yaitu:

1. Bagi pemerintah (instansi), sejauhmana efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok dapat diterapkan.
2. Bagi masyarakat, sejauhmana masyarakat mengetahui, melaksanakan bahkan turut aktif dalam mengawasi efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat ulasan literatur yang relevan dan terbaru sebagai acuan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, serta memuat karya ilmiah yang relevan untuk memperkuat penelitian. Bab ini terdiri dari landasan teori dan hasil penelitian yang relevan

2.1. LANDASAN TEORI.

Pada bagian ini membahas mengenai partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik.

2.1.1. Partisipasi Masyarakat.

Pendekatan partisipatif selain sebagai sebuah proses politik, juga merupakan sebuah proses teknis. Untuk proses ini lebih ditekankan pada peran dan kapasitas fasilitator untuk mendefinisikan dan mendeteksi stakeholders secara tepat. Selain itu proses ini juga diorientasikan untuk memformulasikan masalah secara kolektif, merumuskan strategi dan rencana tindakan kolektif, serta melakukan mediasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya masyarakat. Salah satu hal penting kearah ini adalah penguatan institusi masyarakat sebagai wadah untuk melakukan proses mobilisasi pemahaman, pengetahuan, gagasan dan argument menuju terciptanya kesepakatan bersama sebagai awal dari tindak kolektif penyelesaian masalah dan pemenuhan kebutuhan public.⁶

Perhatian terhadap pentingnya partisipasi dalam konteks apa pun akan menjadi salah satu kunci untuk memadatkan nilai-nilai kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Untuk itu, masyarakat luas sebagai elemen terbesar dalam suatu tatanan kehidupan sosial diharapkan dapat ikut serta dalam proses penentuan

⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, 2006, hal. 38.

arah kebijakan pemerintah dan pembangunan. Melalui paradigma ini, publik menjadi aspek penting dalam perancangan kebijakan.⁷

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang baik secara pribadi maupun bagian dari masyarakat yang ikut ambil bagian dalam suatu kegiatan. Sedangkan pengertian masyarakat adalah kumpulan individu yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang batas-batasnya jelas serta ditunjang oleh faktor adanya hubungan yang kuat antara sesama anggota kelompok.

Beberapa penulis lebih cenderung menggunakan kata partisipasi sedangkan lainnya menggunakan peranserta. Mengkaji hal-hal yang dikemukakan diatas maka dapat disampaikan bahwa maksud dan pengertian kedua kata tersebut adalah sama.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam suatu kegiatan terutama untuk menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat. Partisipasi dapat dilakukan atas nama pribadi untuk mempengaruhi pribadi lainnya. partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau tidak terorganisasi yang secara spontan dan sukarela.

Menurut Sondang. P. Siagian bahwa partisipasi itu ada yang bersifat aktif dan pasif. Partisipasi pasif dapat berarti bahwa dalam sikap, perilaku dan tindakannya tidak melakukan hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan pembangunan. Selanjutnya Siagian menjelaskan partisipasi aktif berwujud :

- a. Turut memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga-lembaga sosial dan politik yang ada dimasyarakat sebagai saluran aspirasinya.
- b. Menunjukkan adanya kesadaran bermasyarakat dan bernegara yang tinggi dengan menyerahkan penentuan nasib kepada orang lain seperti kepada pemimpin, tokoh masyarakat baik yang sifatnya formal maupun informal.

⁷ Ibid, hal. 39.

- c. Memenuhi kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab seperti membayar pajak secara jujur serta kewajiban lainnya.
- d. Ketaatan kepada berbagai perundang-undangan yang berlaku.
- e. Kerelaan melakukan pengorbanan yang dituntut oleh pembangunan demi kepentingan bersama yang lebih luas dan penting⁸.

Keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan pada umumnya didahului oleh adanya kesadaran dan minat yang kemudian menggiring mereka untuk ikut bergabung karena mereka merasa terpanggil untuk ikut terlibat dengan anggota masyarakat lainnya, tetapi dalam beberapa hal, turut sertanya seorang dalam suatu kegiatan adakalanya disebabkan oleh; paksaan, ajakan, bujukan atau perintah dari orang lain. Oleh karena itu partisipasi orang dalam suatu kegiatan memiliki kadar dan tingkat yang berbeda-beda.

Agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan ada tiga syarat yang diperlukan, yakni :

- a. Adanya kesempatan pembangunan.
- b. Adanya kemampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersebut.
- c. Adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

Partisipasi masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan terus ditumbuh-kembangkan agar timbul keterikatan, rasa saling memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) sehingga masyarakat sadar, bergairah serta bertanggung jawab didalamnya⁹.

Menurut Mikhelsen partisipasi akan tumbuh apabila melalui organisasi yang telah dikenal dan sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Manfaat yang diperoleh

⁸ Siagian, Sondang. P, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta, Gunung Agung, 1985, h. 3.

⁹ Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.

melalui partisipasi adalah memenuhi kepentingan mereka. Dalam proses partisipasi, terjamin adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.¹⁰

Partisipasi berarti memberikan sumbangan dalam turut menentukan arah atau tujuan pembangunan, dimana ditekankan bahwa partisipasi adalah merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau tindakan. Istilah partisipasi mengandung makna adanya keikutsertaan yang berarti berani mengambil bagian dalam suatu tahap atau lebih dari suatu proses, dimana partisipasi melibatkan tiga hal pokok yaitu : (1). Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi, (2). Partisipasi menghendaki adanya kontribusi terhadap kepentingan atau tujuan kelompok, dan (3). Partisipasi merupakan tanggung jawab kelompok.

Kata partisipasi menunjukkan tafsiran yang sangat beragam. Menurut pelbagai kajian, dokumen proyek dan buku panduan istilah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- b. Adalah pemekaan (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tersebut.
- d. Adanya pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial.

¹⁰ Mikhelsen, B. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999. hal.18

- e. Adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri.
- f. Adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka¹¹.

Menurut Koentjaraningrat ada dua tipe partisipasi dalam pembangunan yang dalam prinsipnya berdeda, yaitu : partisipasi dalam aktivitas/kegiatan bersama dalam proyek pembangunan yang khusus. Partisipasi sebagai individu diluar aktivitas bersama dalam pembangunan. Tipe partisipasi yang pertama masyarakat dapat diajak, dipersuasi, diperintahkan maupun dipaksa oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan tenaga atau hartanya kepada proyek pembangunan yang biasa bersifat fisik.¹²

Sedangkan dalam bentuk partisipasi yang kedua, partisipasi terjadi dan tumbuh berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memerlukan kesadaran. Dalam hal ini persuasi dan penerangan yang intensif sangat penting peranannya dan baru dapat berhasil kalau ada kerjasama yang baik serta adanya pengertian antara pejabat pemerintah dengan masyarakatnya.

Pemerintah Daerah memiliki rumusan/istilah yang berbeda untuk partisipasi yaitu pendekatan peranserta (*Community Based Approach*), yang pada dasarnya tidak berbeda maksudnya. Pengertiannya adalah pendekatan perencanaan yang bertujuan untuk memberdayakan dan memampukan masyarakat disemua tingkat untuk berperan aktif dalam menentukan pengambilan keputusan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Pendekatan peranserta masyarakat juga dapat diartikan sebagai mendorong pemerintah disemua tingkat untuk memformulasikan kebijakan, strategi,

¹¹ Mikkhelsen, B. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999, h. 64.

¹² Koentjaraningrat, *Migrasi, Transmigrasi dan Urbanisasi, Masalah-Masalah Pembangunan*, Bunga Rampai Antropologi Terapan, LP3ES, Jakarta, 1982. hal.31.

rencana, efektifitas dan pengendalian pembangunan melalui proses konsultasi dan dialog dengan semua *stakeholder*.

Masyarakat (*community*) adalah semua warga atau kelompok yang mendapat manfaat dari adanya proyek, terutama dari golongan yang berpendapatan rendah, masyarakat marginal seperti penduduk asli, lansia, wanita, anak-anak, kelompok masyarakat baik dengan/tanpa status hukum, asosiasi, organisasi komersial skala kecil, kelompok, asosiasi usaha, LSM. Sedangkan *stakeholder* adalah semua warga atau kelompok yang berkepentingan dengan pembangunan kawasan. Terdiri atas kelompok masyarakat yang dipengaruhi oleh pembangunan (pemilik tanah, pengusaha, nelayan, pengrajin, perkumpulan rumah tangga, pemuka agama, dsb), kelompok masyarakat yang mengendalikan pembangunan (investor, Pemda, bank, konsultan) dan kelompok masyarakat yang dapat memberikan bantuan informasi dan kepakaran (LSM, dunia usaha, pakar akademisi, dsb).

Sesuai dengan pendapat-pendapat diatas, peranserta masyarakat merupakan proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan tentang proyek, program dan kebijakan. Dapat diartikan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk menikmati hasil pembangunan dan menjadi bagian dalam proses pembangunannya, sebagai perwujudan dari peransertanya.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur yang sangat penting dalam pembangunan karena:

- a) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut;
- b) Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat;
- c) Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah

yang tanpa keberadaannya akan tidak terungkap. Arus informasi ini tidak dapat dihindari untuk berhasilnya pembangunan;

- d) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki;
- e) Partisipasi memperluas *zone* (wawasan) penerima proyek pembangunan;
- f) Ia akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat;
- g) Partisipasi menopang pembangunan;
- h) Partisipasi menyediakan lingkungan kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia;
- i) Partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah;
- j) Terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri¹³.

2.1.1.1. Landasan Hukum Partisipasi Masyarakat.

Dasar hukumnya tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 yang menekankan bahwa,

Agar pembangunan nasional dilaksanakan bersama, oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan serta menciptakan suasana yang kondusif. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah seharusnya saling menunjang, saling mengisi

¹³ Moeljarto. T, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1987, h. 48-49.

dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Bab XII yaitu Peran Serta Masyarakat.

Pasal 32 :

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam pengelolaan kualitas udara.
- (2) Pembinaan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. melakukan sosialisasi kebijakan pencegahan, penanggulangan pencemaran udara dan pendampingan dalam upaya pemulihan mutu udara;
 - b. melakukan pendidikan dan pelatihan pengendalian pencemaran udara;
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Pembinaan pengendalian pencemaran udara dapat dilakukan melalui pemberian insentif bagi pelaku usaha dan atau kegiatan yang menaati peraturan pengendalian pencemaran udara.
- (2) Insentif sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Surat Peraturan Gubernur No. 75. Tahun 2005
Tentang larangan tempat merokok yaitu :

TEMPAT KERJA

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib melarang kepada staf dan/atau pegawainya untuk tidak merokok di tempat kerja.
- (2) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya merokok di tempat kerja.
- (3) Staf dan/atau karyawan dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau penanggung

jawab tempat kerja, apabila ada yang merokok di tempat kerja.

(4) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat kerja, dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai Kawasan merokok.

SANKSI

Pasal 27

(1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti membiarkan orang merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;*
- b. penghentian sementara kegiatan atau usaha;*
- c. pencabutan izin.*

(2) Setiap orang yang terbukti merokok di kawasan dilarang merokok, dapat dikenakan sanksi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan/atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.*
- b. memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.*

Pasal 20

(1) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarganya dan/atau lingkungannya.

(2) *Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari sap rokok.*

Untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur tersebut didukung pula Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 72 tahun 2006 tentang Pembinaan dan pengawasan pada kawasan dilarang merokok dan untuk koordinasi penegakan hukumnya terdapat pada Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 74 tahun 2006 tentang Koordinasi Penegakan Hukum kawasan dilarang merokok.¹⁴

2.1.1.2. Manfaat Partisipasi Masyarakat.

Keuntungan ikut berpartisipasi untuk masyarakat adalah : (1) masyarakat mendapat informasi mengenai rencana pembangunan didaerahnya, (2) masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya, (3) pemerintah mendapat informasi dari masyarakat sehingga kebijakan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, karena didalam informasi tersebut sering ditemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat, dan (4) masyarakat dapat menyiapkan diri dalam menerima manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan terkena dampak negatif.

Sisi lain juga yang tidak kalah penting adalah adanya pandangan seseorang tentang manfaat dari program atau kegiatan yang akan diikutinya. Seseorang dikatakan memiliki sikap positif terhadap suatu obyek/kegiatan apabila ia suka (*favorable*), sebaliknya jika negatif apabila

¹⁴ Biro Hukum Provinsi Daerah Khusus Ib Kota Jakarta, Tahun 2006.

ia tidak suka (*unfavorable*).¹⁵ Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh yang menyatakan bahwa untuk dapat meningkatkan partisipasi maka masyarakat harus diberitahu tujuan dan kegunaan dari suatu kegiatan tersebut, karena partisipasi yang dilandasi oleh pengetahuan dan kegunaan suatu program/kegiatan biasanya akan menghasilkan tingkat partisipasi yang bersifat spontan.¹⁶

2.1.1.3. Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Tingkat Partisipasi.

Secara umum partisipasi akan lebih besar apabila terdapat pada kelompok yang mempunyai pendidikan lebih tinggi, mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang lebih tinggi serta mempunyai kelompok umur pertengahan.

Pendidikan yang pernah diperoleh seseorang juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasinya. Biasanya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, semakin luas pengetahuannya dan kesadarannya terhadap lingkungan yang pada akhirnya akan diikuti dengan keterlibatannya pada masalah-masalah kemasyarakatan.

Senada dengan pernyataan diatas, tingkat pendidikan masyarakat yang tinggi dengan pengetahuan yang cukup akan membawa dan mengarahkan masyarakat itu sendiri untuk selektif terhadap pengurusan lingkungan. Masyarakat yang memiliki status pendidikan yang lebih tinggi akan mengerti fungsi dan peranan lingkungan sekitar bagi kepentingan mereka sendiri. Keadaan ini jauh berbeda dengan masyarakat yang berpendidikan lebih rendah,

¹⁵ Davis, Keith. *Human Relation at Work*, New York, McGraw Hill Book Company, Inc, 1962.hal.12

¹⁶ Koentjaraningrat, *Op.cit.* hal. 26.

mereka biasanya kurang mengerti tentang fungsi dan peranan lingkungan sekitar.

Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam mengikuti kegiatan lingkungannya, antara lain : (1) umur, (2) pekerjaan, (3) penghasilan, (4) pendidikan, (5) lama tinggal. Dalam uraiannya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, diterangkan bahwa individu pada usia menengah ke atas cenderung untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dilingkungannya. Individu dengan pekerjaan yang mantap (mempunyai pekerjaan tetap) cenderung untuk berpartisipasi. Begitu pula dengan penghasilan, semakin tinggi penghasilan makin besar partisipasi yang dapat diberikan, karena secara umum jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya maka ia dapat cenderung untuk tidak aktif berpartisipasi. Oleh karena itu pekerjaan dan penghasilan merupakan faktor yang dapat menempatkan seseorang pada posisi atau kelas ekonomi tertentu dalam masyarakat, dimana hal tersebut akan berperan dalam menentukan aktifitas yang diikutinya.

Lama tinggal juga seringkali menjadi salah satu faktor yang tidak kecil peranannya dalam mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang dalam kegiatan yang ada dilingkungannya. Semakin lama seseorang tinggal disuatu tempat, semakin besar rasa memiliki (*sense of belonging*) dan perasaan diri sebagai bagian dari lingkungannya. Sehingga dengan demikian akan diikuti oleh timbulnya keinginan untuk selalu menjaga dan memelihara lingkungannya.

2.1.1.4. Tahapan Dalam Partisipasi.

Partisipasi juga dapat dibagi kedalam beberapa tahapan, diantaranya adalah :

1. Partisipasi dalam proses perencanaan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan penting bagi masyarakat dalam menentukan arah dan strategi pembangunan dengan menyesuaikan pada sikap dan orientasi masyarakat itu sendiri. Millar dan Rein dalam Ndraha mengemukakan bahwa:

Suatu rencana atau keputusan yang telah disiapkan oleh pemerintah dan masyarakat hanya mendapatkan kesempatan untuk menyatakan setuju (biasanya setelah diarahkan terlebih dahulu), tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Demikian juga alasan pengikutsertaan masyarakat sejak awal sekali akan memperlambat proses pembangunan.¹⁷

Oleh Tjokroamidjojo (2000:32) mengatakan bahwa rencana adalah suatu desain dari pada kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mempergunakan potensi sumber-sumber sebaik mungkin untuk mencapai suatu tujuan dengan sebaik mungkin¹⁸. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan merupakan proses pemilihan alternatif-alternatif berdasarkan pertimbangan yang menyeluruh sehingga diperoleh strategi, kebijakan yang akan dilaksanakan berdasarkan usul, saran dan masukan bersama yang dilakukan secara musyawarah atau cara lainnya.

¹⁷ Koentjaraningrat, *Migrasi, Transmigrasi dan Urbanisasi, Masalah-Masalah Pembangunan*, Bunga Rampai Antropologi Terapan, LP3ES, Jakarta, 1982.hal.65

¹⁸ Tjokroamidjojo. Bintoro, *Perencanaan Pembangunan dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Grasindo, Jakarta, 2000.

2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Pelaksanaan sudah merupakan sesuatu hal yang telah dipertimbangkan pada proses perencanaan yang telah direncanakan dan disepakati. mengemukakan bahwa :

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lebih menekankan pada kemauan sendiri secara sadar untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pembangunan, disini semua potensi manusia (tenaga kasar dan terampil serta dana) diarahkan bagi pelaksanaan pembangunan baik melalui swadaya gotong royong maupun sumbangan sukarela¹⁹.

Dari pengertian ini partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan terdapat pengertian yang optimal dari potensi yang meliputi pengerahan daya, dana, keterampilan, fasilitas dan beban yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan ini sehingga tercipta suasana yang mendukung dari masyarakat dan aktivitas dalam pelaksanaannya.

3. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan evaluasi.

Partisipasi aktif masyarakat dalam evaluasi pembangunan erat hubungannya dengan aktifitas dalam menemukan penyimpangan baik sejak proses perencanaan, pelaksanaan maupun sampai berhasilnya program tersebut dilaksanakan. Berkaitan dengan evaluasi pembangunan Tjokroamidjojo mengatakan :

Dalam rangka menyesuaikan dengan kepentingan masyarakat, maka pengawasan dan partisipasi tidak cukup dilakukan oleh lembaga-lembaga formil tetapi oleh organisasi-organisasi masyarakat, golongan-golongan kepentingan (termasuk

¹⁹ Koentjaraningrat, *op.cit.* hal. 80.

golongan cendekiawan, buruh, wanita, mahasiswa) kelompok-kelompok profesi bahkan anggota masyarakat sehingga pelaksanaan administrasi dapat lebih dipertanggungjawabkan atau dengan kata lain lebih sesuai dengan kepentingan masyarakat²⁰.

Masyarakat harus terlibat terhadap penyelenggaraan pembangunan desa baik yang ditentukan lembaga formal maupun informal, secara langsung atau tidak langsung segenap aktivitas publik. Hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai harus tetap dipelihara sehingga pemanfaatan tetap dirasakan dalam jangka waktu lama sehingga tetap berkelanjutan antar generasi yang ada.

2.1.1.5. Delapan Tingkat Partisipasi Masyarakat.

Perbedaan tingkat peranserta masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan masyarakat dalam mempengaruhi perencanaan.

Tingkat yang paling bawah (1) *manipulation* dan (2) *therapy* disimpulkan sebagai tingkat yang bukan peranserta atau "non-participation". Tingkat (3) *informing* dan (4) *consultation* disebut sebagai tingkat "tokenism" atau sekedar formalitas yang memungkinkan masyarakat untuk mendengar dan memiliki hak memberikan suara. Namun demikian suara dan pendapat mereka belum tentu menjadi bahan pengambilan keputusan.

Bentuk yang ke (5) *placation* dipandang sebagai *tokenisme* pada tingkat yang lebih tinggi dimana masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran dan nasihat, tetapi kekuasaan untuk mengambil keputusan tetap berada ditangan pemrakarsa kegiatan. Pada tingkat ke (6) *partnership*, masyarakat memiliki ruang untuk bernegosiasi

²⁰ Tjokroamidjaja, Loc. Cit. Hal. 32.

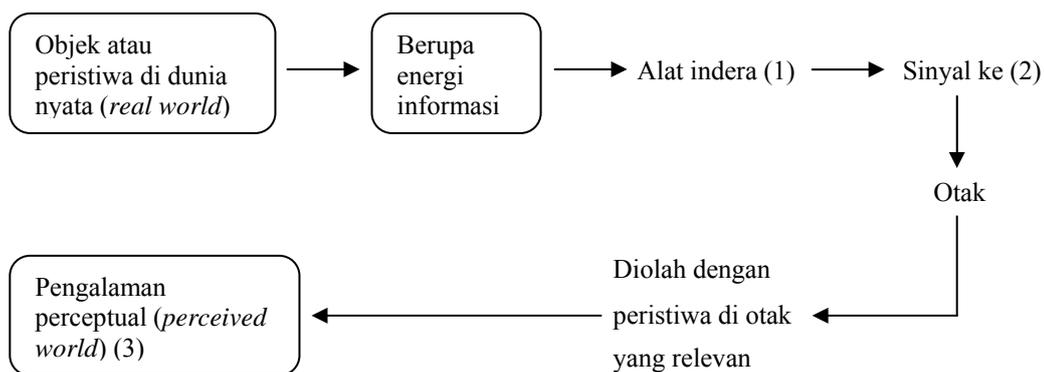
dan terlibat dalam tawar-menawar dengan pemegang kekuasaan. Pada tingkat ke (7) *delegated power* dan (8) *citizen control*, masyarakat memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan. Terlihat bahwa peranserta masyarakat bisa sekedar "retorik" dan bukan "substansif" dimana masyarakat memiliki ruang yang luas dan gagasan mereka menjadi bahan dalam pengambilan keputusan.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang berada di suatu wilayah geografi yang sama dan memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada di sekitarnya.

2.1.2 Persepsi

Persepsi terjadi di dalam benak individu yang mempersepsi, bukan di dalam objek dan selalu merupakan pengetahuan tentang penampakan. Maka apa yang mudah bagi kita, boleh jadi tidak mudah bagi orang lain, atau apa yang jelas bagi orang lain mungkin terasa membingungkan bagi kita.²¹

Proses persepsi dapat digambarkan dalam skema berikut :



Gb 2. Proses persepsi dalam diri

²¹ Marhaeni Fajar. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2008. hal. 150

Persepsi juga dapat didefinisikan sebagai “proses dimana individu menerima stimuli melalui berbagai sensasi dan menginterpretasikannya”.²²

Sifat-sifat persepsi yaitu persepsi adalah pengalaman. Untuk mengartikan makna dari seseorang, objek atau peristiwa, kita harus memiliki dasar/basis untuk melakukan interpretasi. Dasar ini biasanya kita temukan pada pengalaman masa lalu kita dengan orang, objek atau peristiwa tersebut, atau dengan hal-hal yang menyerupainya. Tanpa landasan pengalaman sebagai pembandingan tidak mungkin untuk memprestasikan suatu makna, sebab ini akan membawa kita kepada suatu kebingungan.

Proses psikologis dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Ketika mempersepsikan hanya bagian-bagian tertentu dari suatu objek atau orang. Dengan kata lain kita melakukan seleksi hanya pada karakteristik tertentu dari objek-objek persepsi kita dan mengabaikan yang lain. Dalam hal ini biasanya kita mempersepsikan apa yang kita “inginkan” atas dasar sikap, nilai dan keyakinan yang ada dalam diri kita dan mengabaikan karakteristik yang telah relevan atau berlawanan dengan nilai dan keyakinan tersebut.

Proses psikologis dari persepsi mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi pada dasarnya adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Setiap persepsi yang kita lakukan, akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Hal ini antara lain disebabkan oleh pengaruh pengalaman masa lalu, selektifitas dan penyimpulan. Biasanya ketidakakuratan ini terjadi karena

²² Aaker, David A & John G. Myers. *Advertising Management, Second Edition*. New Delhi: Prentice Hall of India. 1993. hal 45.

penyimpulan yang terlalu mudah, atau menyamakan. Adakalanya persepsi tidak akurat karena orang menganggap sama, sesuatu yang sebenarnya hanya mirip. Dan semakin tidak akurat persepsinya.

Persepsi tidak akan pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek persepsi. Karena persepsi merupakan proses kognitif psikologis yang ada di dalam diri kita, maka bersifat subjektif.

Setiap orang memiliki persepsi yang berbeda saat mendapatkan stimuli objek yang sama, karena disebabkan oleh factor-faktor tertentu yang mempengaruhi persepsi, yakni :

- a. Faktor personal. Karakter orang yang melakukan persepsi mempengaruhi bagaimana ia mempersepsi suatu objek, mencakup :
 1. Kebutuhan atau motif.
 2. Sikap, nilai preferensi, dan keyakinan.
 3. Tujuan.
 4. Kapasitas, mencakup hal-hal seperti: tingkat intelegensia, kemampuan akan suatu topik dan kemampuan berbahasa.
 5. Kegunaan, yakni orang cenderung untuk mengerti dan lebih mengingat pesan-pesan yang berguna bagi dirinya.
 6. Gaya komunikasi.
 7. Pengalaman dan kebiasaan. Terbentuk dari pendidikan dan budaya.
- b. Faktor-faktor yang berasal dari stimuli, mencakup :
 1. Karakteristik fisik stimuli. Misalnya: ukuran, warna, intensitas, dsb.
 2. Pengorganisasian pesan. Cara bagaimana pesan diatur atau diorganisasikan mempengaruhi persepsi.
 3. Novelty (kebaruan, keluarbiasaan, sesuatu yang baru). Hal-hal yang baru atau luar biasa akan lebih dapat menyedot

perhatin dibandingkan hal-hal yang rutin atau biasa-biasa saja.

4. Model, yakni bagaimana informasi itu diserap oleh pancaindra, melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, atau pengecapan.
 5. Asal mula informasi. Apakah berasal dari lingkungan fisik, dari diri sendiri atau orang lain (melalui komunikasi antar pribadi), dari media massa dan lain-lain.
- c. Faktor lingkungan. Situasi komunikasi, setting atau konteks yang mendasari suatu proses komunikasi berpengaruh pada persepsi akan suatu hal.

2.1.3 Kebijakan Publik

Analisis kebijakan adalah aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Pengetahuan tersebut betapapun tetap tidak lengkap kecuali jika hal tersebut disediakan kepada pengambil kebijakan dan publik terhadap siapa para analisis berkewajiban melayaninya. Efektifitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap stok pengetahuan yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktik dan teori pembuatan kebijakan publik.²³

Mustopadidjaja (2003:32) mengatakan bahwa berhasil tidaknya suatu kebijakan yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan tertentu yang dihadapi masyarakat bangsa, atau untuk mencapai tujuantujuan tertentu dalam rangka kehidupan bernegara, akan sangat tergantung pada tahapan pelaksanaannya/efektifitas kebijakan itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, maka berhasil tidaknya suatu pembangunan sangat ditentukan oleh pelaksanaan kebijakan yang berkenaan dengan kawasan dilarang merokok di DKI Jakarta. Untuk itu,

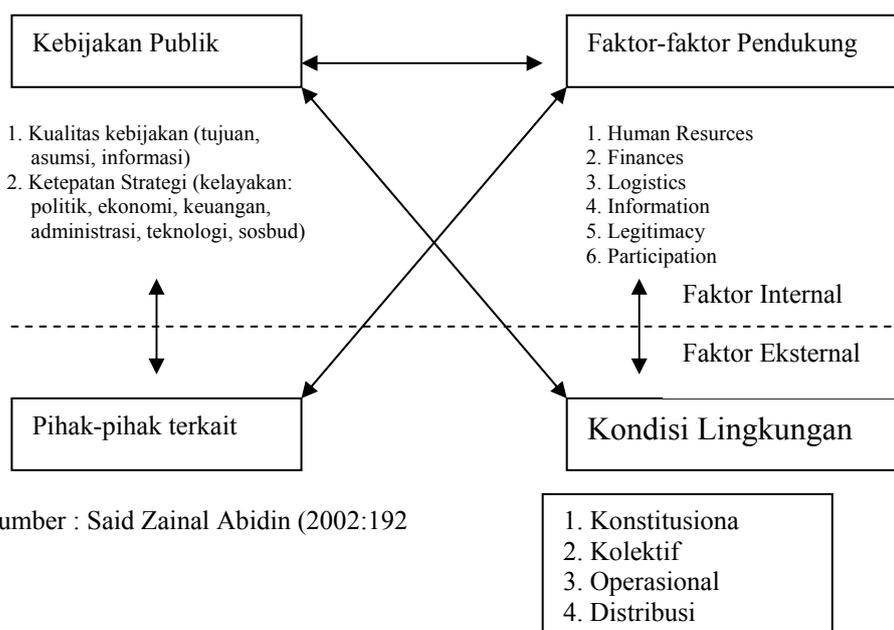
²³ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Edisi Kedua, 1999, hal. 1.

maka dalam bab berikutnya (Bab IV) akan dibahas pelaksanaan kebijakan tentang kawasan dilarang merokok di DKI Jakarta. Dalam hal efektifitas kebijakan, Said Zainal Abidin menegaskan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan 4 (empat) factor utama, yakni 2 (dua) faktor utama internal, dan 2 (dua) faktor utama eksternal.²⁴

Faktor utama internal meliputi kebijakan yang akan dilaksanakan dan faktor-faktor pendukung. Sementara factor utama eksternal adalah meliputi kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait.

Teori-teori tersebut sangat cocok untuk melihat bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan dalam lingkungan Kabupaten Tangerang. Dengan demikian dapat diketahui layak-tidaknya kualitas dan strategi suatu kebijakan. Dalam hal pengaruh kebijakan penanaman modal, maka persepsi masyarakat sangat diperlukan untuk melihat sejauhmana dampak tersebut.

Kondisi kebijakan merupakan faktor-utama-internal pertama yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru kebijakan itu sendiri. Tanpa ada kebijakan tidak ada yang dilaksanakan. Pada tingkat pertama ini, berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal yaitu kualitas kebijakan dan ketepatan strategi pelaksanaan.



Sumber : Said Zainal Abidin (2002:192)

²⁴ Mustopadidjaja AR, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Efektifitas dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Indonesia, Jakarta. 2003. Hal. 32

Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Sebab itu banyak kegagalan yang terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat. Secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan bila mengandung beberapa elemen sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu haruslah rasional yaitu diterima dan dipahami oleh akal sehat) dan diinginkan (*desirable*) yaitu harus menyangkut kepentingan orang banyak sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis. Asumsi tidak mengada-ngada, karena asumsi menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat kalau didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Ketepatan suatu strategi ditentukan oleh kemampuan menyebarkan aspek-aspek positif dari kebijakan dan cukup advokatif dalam hal perbedaan pandangan, dan antisipatif dalam hal tantangan perubahan di lapangan.

Beberapa criteria yang biasa dipakai dalam mengukur ketepatan suatu strategi kebijakan publik adalah :²⁵

1. Kelayakan politik (*political feasibility*)

Kemampuan untuk merealisasikan atau mewujudkan kebijakan berkat dukungan politik yang ada. Suatu kebijakan yang tidak mendapat dukungan politik tidak akan terlaksana. Dalam hal ini, kebijakan akan optimal bila mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat, khususnya dari partai politik. Tanpa dukungan

²⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Yayasan Pancur Siwah, 2002, hal. 179-181

elemen-elemen tersebut, kebijakan akan menemui kegagalan. Namun sebaliknya, elemen-elemen tersebut hendaknya bersifat kritis terhadap suatu kebijakan. Sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kebijakan.

2. Kelayakan ekonomi (*economic feasibility*)

Kelayakan ekonomi erat kaitannya dengan dampak dari kebijakan yang dilihat dari segi ekonomi. Apabila kebijakan yang dikeluarkan secara ekonomi tidak menguntungkan maka kebijakan tersebut perlu dipertimbangkan kembali. Selain itu, kelayakan ini juga sangat terkait dengan rasa keadilan bagi masyarakat guna berperan aktif dalam pembangunan daerahnya. Juga, terkait dengan bagaimana pengaruhnya pada daya saing bangsa, bagaimana pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya.

3. Kelayakan keuangan/biaya (*financial feasibility*)

Setiap kebijakan tentu saja memerlukan dukungan *budgeting* atau pembiayaan yang terkadang sangat besar. Namun, tentu saja manfaat dari kebijakan bersangkutan harus lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Maka, yang diperhatikan di sini adalah kelayakan dari segi biaya dan keuntungan. Apakah biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding keuntungan adanya kebijakan tersebut?. Bila demikian, maka sebaiknya kebijakan tersebut, ditangguhkan. Persoalannya adalah apakah kebijakan itu mudah mendapat dukungan keuangan? Adakah sumber pembiayaannya?

4. Kelayakan administrasi (*administrative feasibility*)

Kelayakan ini lebih menekankan pada kemampuan aparatur pelaksana dalam mengelola kebijakan itu sendiri. Suatu kebijakan tidak hanya cukup dibuat, akan tetapi perlu dikelola oleh para pelaksana. Ini artinya, apakah ada kemampuan administrasi untuk merealisasikan kebijakan yang bersangkutan. Apakah gagasan atau strategi yang disarankan dalam suatu kebijakan dapat dilaksanakan

sesuai dengan faktor-faktor pendukung (*supporting factors*) administrasi yang ada.

5. Kelayakan teknologi (*technological feasibility*)

Kelayakan teknologi harus lebih melihat pada teknologi tepat guna, bukan kecanggihan teknologi. Dalam hal ini ketersediaan dan dukungan teknologi harus yang sesuai. Itulah sebabnya pelaksanaan suatu kebijakan yang memerlukan teknologi tinggi sulit dilakukan di negara-negara baru berkembang.

6. Kelayakan sosial budaya (*socio-cultural feasibility*)

Pendekatan kemasyarakatan merupakan strategi yang tepat dalam suatu efektifitas kebijakan. Artinya, diperlukan keterlibatan masyarakat agar kebijakan itu dirasakan sebagai kebijakan bersama, bukan kebijakan 'hasil' pemerintah semata. Maka, kelayakan ini sangat ditentukan oleh kemampuannya memperoleh dukungan dari pimpinan masyarakat, yang secara sosial-budaya (*socio-cultural*) mempunyai pengaruh yang besar di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, dalam kawasan dilarang merokok di DKI Jakarta hendaknya memperhatikan dan memberdayakan petani atau nelayan sekitar. Dengan menghormati dan memberdayakan masyarakat sekitar, maka tanpa harus dituntut/diminta, masyarakat akan secara sukarela mendukung penanaman modal tersebut. Apalagi bila bahan baku yang dipakai oleh suatu industri, dapat menggunakan atau mbedayakan bahan baku dari masyarakat sekitar.

7. Kelayakan-kelayakan lain sesuai dengan criteria apa yang dibuat secara khusus.

Dimaksudkan sebagai kriteria tambahan yang khusus berhubungan dengan keadaan, tempat dan tujuan tertentu. Kriteriakriteria ini, seperti keadilan (*equity*), terjangkau (*reachable*) baik dari segi harga maupun dari segi jarak dan alat transportasi yang ada, meningkatkan kemampuan dan keterampilan masyarakat (*improvement*),

memberdayakan masyarakat (*empowerment*), dan meningkatkan harga diri masyarakat (*sosial self esteem*).

Faktor-utama-internal kedua dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah sumberdaya yang merupakan faktor pendukung (*supporting factors*). Dalam pengertian ekonomi bisnis (*microeconomics*), faktor pendukung biasa disebut *inputs*. Namun dalam beberapa hal ada perbedaan antara *inputs* dalam pengertian bisnis dengan faktor pendukung dalam pengertian manajemen publik atau kebijakan publik. Input dalam mikroekonomi meliputi 6M: *Men, Money, Material, Methods, Machine* dan *Market*. Sedangkan dalam manajemen publik dikenal dengan SDM (*human resources*), keuangan (*finance*), logistik (*logistics*), informasi (*information*), legitimasi (*legitimation*), dan partisipasi (*participation*).²⁶

Faktor utama eksternal meliputi factor lingkungan/kondisi lingkungan dan factor pihak-pihak terkait. Faktor lingkungan atau kondisi lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan merupakan faktor penentu. D.J. Calistas melihat sekalipun pelaksanaan berada pada tingkat operasional, namun proses pelaksanaan kebijakan bergerak dalam empat lapisan lingkungan institusional yaitu konstitusional, kolektif, operasional dan distribusi.²⁷

Pelaksanaan kebijakan pada taraf konstitusional terkait dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan keputusan politik yang bentuknya ditentukan oleh suatu interaksi antara berbagai institusi politik, kepentingan perorangan, pendapat masyarakat dan pilihan atas dasar konstitusi. Pada taraf kolektif, proses pelaksanaan kebijakan merupakan keputusan bersama berbagai kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat. Pada taraf operasional, proses pelaksanaan adalah keputusan yang bersifat operasional yang bergerak dalam situasi yang sudah dibentuk, dan melalui kebijakan tersebut diharapkan dapat menimbulkan perubahan-perubahan ke arah yang dikehendaki. Pada

²⁶ *Ibid.* hal. 190

²⁷ *Ibid.* hal.191

taraf terakhir, proses pelaksanaan diharapkan dapat menyebarkan hasil dari suatu kebijakan atau menimbulkan perubahan yang merupakan *outcomes* dari suatu kebijakan.

Dalam hal kemungkinan adanya kondisi kegagalan (*policy failure*) dalam efektifitas kebijakan, mengungkapkan bahwa kegagalan efektifitas kebijakan bisa berada pada 2 (dua) kondisi yaitu kondisi *non-implementation* atau *unsuccessful-implementation*.²⁸

Kondisi *non-implementation* terjadi apabila kebijakan tidak dilaksanakan secara semestinya, disebabkan oleh tiadanya kerjasama antar pelaksana, terdapat beberapa kendala yang tak teratasi, dan sebagainya. Sedangkan *unsuccessful implementation* terjadi apabila kebijakan tidak mencapai tujuan yang ditetapkan padahal telah dilaksanakan secara utuh, dan kondisi lingkungan tidak merupakan kendala.

Definisi Efektifitas Kebijakan Publik

1. **Riant Nugroho D**, mengatakan bahwa efektifitas kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya melalui intervensi. Dimana efektifitas kebijakan sebenarnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan definisi lain dari efektifitas kebijakan publik yaitu sebagai suatu langkah penentu berhasil tidaknya suatu kebijakan yang diambil oleh seluruh atau sebagian stake holder termasuk pemerintah, masyarakat, swasta, dan lembaga lain guna mencapai tujuan dalam kerangka *policy cycle system* (rangkaian sistem kebijakan).
2. **Mustopadidjaja AR**, mengatakan bahwa efektifitas kebijakan merupakan suatu tahapan dalam *policy cycle* dari keseluruhan proses kebijakan yang berlangsung dalam suatu *policy system* yang kompleks dan dinamik, serta akan menentukan berhasil atau gagalnya suatu kebijakan.²⁹

²⁸ Mustopadidjaja, *Op.Cit.* hal. 32

²⁹ *Ibid.* hal. 32

3. **Said Zainal Abidin** mengatakan bahwa efektifitas kebijakan adalah upaya pemerintah untuk memenuhi keinginan masyarakat yang tidak terlepas dari berbagai konflik politik dalam masyarakat, dimana suatu efektifitas kebijakan merupakan suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multiorganisasional.³⁰

2.2. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN.

- 1) Setiarini Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta 1999 tesis yang berjudul "Partisipasi Publik Dalam Proses Pembahasan Undang-Undang di DPR RI Periode 1997-1999 (Studi kasus Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik).

Menganalisis norma proses tahapan analisis kebijakan publik dalam pembuatan keputusan dengan aturan mekanisme proses pembuatan undang-undang didalam tata tertib DPR-RI, Keppres 118 tahun 1998, serta tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang berkenaan dengan proses tersebut. Berdasarkan penelitian, ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang Partai Politik di DPR rendah. Hal ini disebabkan mekanisme pembahasan di DPR tidak mendukung terjaringnya partisipasi masyarakat tersebut, kepentingan golongan yang menonjol, anggaran yang terbatas serta sosialisasi rancangan undang-undang yang sangat kurang. Untuk menjaring partisipasi masyarakat diperlukan perubahan tata tertib DPR, dan perubahan uraian tugas sekretariat jenderal DPR, serta penambahan anggaran pembahasan undang-undang. Faktor-faktor di luar mekanisme intern DPR juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, seperti hubungan antara fraksi dan daerah pemilihan, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat secara umum.

- 2) Bambang Ismail, Pascasarjana Universitas Indonusa Esa Unggul, 2005, tesis berjudul "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Dampak

³⁰ Said Zainal Abidi, *Op.Cit.* hal. 189.

Efektifitas Kebijakan Publik Dalam Bidang Penanaman Modal Pada Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Tangerang”

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan dalam efektifitas kebijakan dalam bidang penanaman modal perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan terhadap kualitas dan kelayakan strategi kebijakan tersebut. Namun demikian, kondisi *non implementation* ini bukan berarti tidak ada upaya dari para *stakeholders*. Hanya saja tentunya perlu adanya kerjasama antar pelaksana. Rendahnya kualitas kebijakan dapat dilihat dari tujuan yang semata-mata hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, aspek-aspek pembangunan berkelanjutan belum menjadi pertimbangan. Tujuan untuk mendorong 'Pembangunan Nasional' dianggap terlalu luas. Sebaiknya lebih fokus pada 'Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan'. Selain itu, asumsi dan informasi yang digunakan belum lengkap.

- 3) Syakir, tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata dan Keterlibatan Masyarakat (Studi Lapangan di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang Propinsi Banten), Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004.

Pengembangan pariwisata yang dilaksanakan dikawasan wisata Anyer terkait dengan penataan dan pengembangan produk-produk wisata yang meliputi pengembangan obyek-obyek wisata alam dan budaya, pengembangan akomodasi dan fasilitas penginapan serta hotel sehingga mampu memperlancar dan mengembangkan daya tarik wisata baru untuk meningkatkan kunjungan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata dikawasan wisata Anyer selama ini sejak daerah tersebut dijadikan kawasan wisata dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi. Dari sisi ekonomi dengan keberadaan pariwisata, masyarakat sekitar dapat mengembangkan usaha untuk meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan. Dimana sebelum daerah ini dikembangkan sebagai obyek wisata pada umumnya masyarakat setempat bermata pencarian sebagai nelayan dan petani, pencarian yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan pengembangan pariwisata sektor

mata pencarian masyarakat berkembang dengan memanfaatkan peluang dan kesempatan dari banyaknya kunjungan wisatawan. Masyarakat membuka usaha penginapan dan tempat peristirahatan atau rumah makan, warung telekomunikasi, jasa penyewaan, keperluan alat memancing dan olah raga pantai, pemijatan tradisional, hingga menjadi pemandu wisata.

Dari sisi lain kebudayaan dan kesenian di daerah tersebut pada umumnya semakin berkembang seiring kebutuhan dari pertunjukan yang ditampilkan setiap saat. Selain kegiatan dan kreasi-kreasi yang terus berkembang dari kesenian ini dengan keberadaan pariwisata budaya dan kesenian tradisional yang dimiliki oleh daerah tersebut tetap terlestarikan sebagai salah satu daya tarik wisata.

Meskipun keberadaan pariwisata dikawasan Anyer memberikan manfaat yang besar sebagai salah satu penghasil devisa dan mempengaruhi masyarakat untuk terlibat karena memberikan manfaat secara ekonomis namun, pengembangan pariwisata di kawasan Anyer masih memerlukan perbaikan dan peningkatan baik secara prasarana, pengetahuan tentang kepariwisataan yang lebih mendalam kepada masyarakat sehingga mutu dan daya tarik wisata yang ada di daerah ini dapat lebih meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan filosofi dari gagasan riset yang diajukan, sehingga memerlukan suatu model penelitian. Juga menjelaskan kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya melalui suatu model penelitian. Bab ini terdiri dari kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, desain penelitian, definisi operasional, sumber pengumpulan data dan metoda analisis penelitian.

3.1. Kerangka Pemikiran.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Partisipasi dan persepsi Masyarakat baik secara parsial maupun secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok. Untuk lebih jelasnya sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari apakah:

1. Apakah partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta Barat?
2. Apakah partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta Barat?

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, penelitian ini akan mengkaji tiga variable, yaitu dua variable bebas (*independent*) dan satu variable terikat (*dependent*). Variabel bebasnya adalah (a) Partisipasi Masyarakat, yang diberi notasi (X_1) dan (b) persepsi masyarakat dengan notasi (X_2), sedangkan variable terikatnya adalah Efektifitas Kebijakan Publik (Y).

Berdasarkan pembagian variable tersebut, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif kausalitas. Metode ini bertujuan memberikan gambaran tentang frekuensi tinggi rendahnya masing-masing variable yang diteliti dan menggali saling keterkaitannya dengan

menganalisis pada hubungan dan pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Pola pengaruh yang akan dikaji dalam penelitian ini dibuat dalam bentuk kerangka pemikiran secara sederhana seperti pada diagram dibawah ini.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi akan tumbuh apabila melalui organisasi yang telah dikenal dan sudah ada ditengah-tengah masyarakat yang bersangkutan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi adalah memenuhi kepentingan mereka. Dalam proses partisipasi, terjamin adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat.

Partisipasi dapat dibagi dalam beberapa tahapan antara lain :

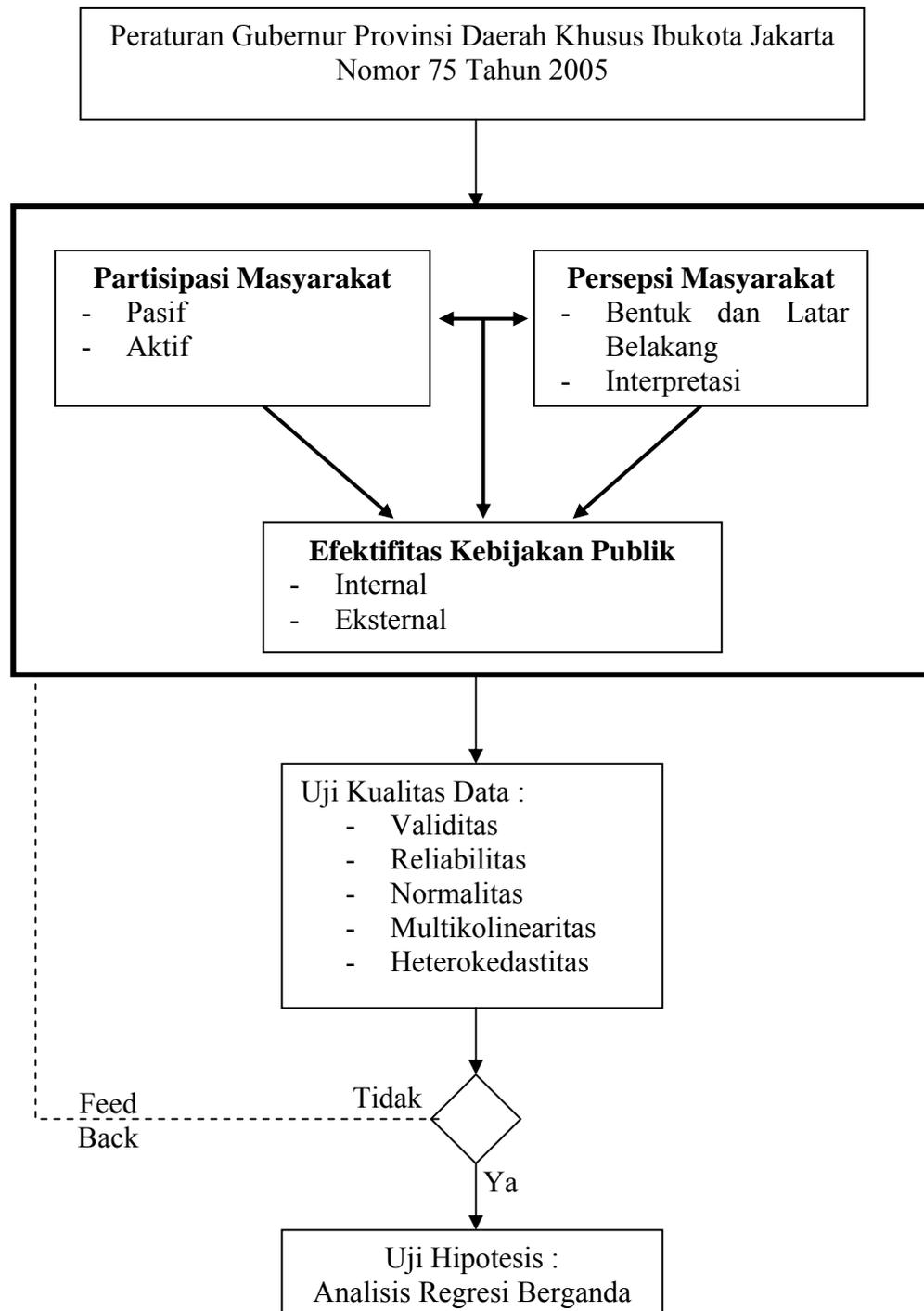
- a. Partisipasi dalam proses perencanaan
- b. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan evaluasi.

2. Persepsi masyarakat

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses dimana individu menerima stimuli melalui berbagai sensasi dan menginterpretasikannya. Proses persepsi meliputi dua tahapan, yakni perahitian dan interpretasi. Keduanya memiliki peranan dalam membantu individu memfilter banyaknya stimuli yang masuk dalam jumlah yang tak terbatas menjadi jumlah yang memungkinkan untuk diproses.

3. Efektifitas kebijakan publik

Proses pelaksanaan berkaitan dengan faktor utama internal yaitu human resources dalam pengertian publik, faktor keuangan dan logistik untuk keperluan pembiayaan menggunakan uang relatif lebih longgar, selanjutnya manajemen publik dikelola melalui informasi, keabsahan atau legitimasi suatu kebijakan juga sangat penting dan faktor pendukung terakhir adalah partisipasi. Sementara faktor-faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan terdiri dari konstitusional, kolektif, operasional dan distribusi.

Gambar 3.1 Skema Kerangka Pemikiran

3.2. Hipotesis Penelitian.

Sebagaimana telah diuraikan berdasarkan tujuan penelitian, perumusan masalah penelitian dan kerangka pikir penelitian, maka hipotesis penelitian dapat disusun sebagai berikut :

- a. Diduga terdapat pengaruh partisipasi dan persepsi masyarakat secara individu terhadap efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta Barat.
- b. Diduga terdapat pengaruh partisipasi dan persepsi masyarakat secara bersama-sama dengan efektifitas kebijakan Peraturan Gubernur No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok di Jakarta Barat.

3.3. Desain Penelitian.

Desain riset (*research design*) merupakan suatu cetak biru (*blue print*) bagaimana data tersebut dikumpulkan, diukur dan dianalisis³¹. Berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, maka desain penelitian yang digunakan pada kajian ini adalah :

- a. Desain deskriptif (paparan), yang ditujuakn untuk mendeskripsikan variabel-variabel independen ; partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat.
- b. Desain kausal dalam hal ini akan menganalisa hubungan dan pengaruh antara dua variabel bebas dengan satu variabel terikat atau bagaimana suatu variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, baik secara individu maupun secara bersama-sama.

3.4. Defenisi, Operasional dan Pengukuran Variabel.

Operasionalisasi persepsi partisipasi masyarakat dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

³¹ Husein Umar. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 180.

Tabel 3.1
Operasionalisasi Partisipasi Masyarakat

| Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Partisipasi Masyarakat | Pasif | 1. Memberikan bimbingan dampak rokok | Interval |
| | | 2. Meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan | Interval |
| | Aktif | 3. Mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya | Interval |
| | | 4. Melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial | Interval |
| | | 5. keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri. | Interval |
| | | 6. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka | Interval |

Sumber : Mikkhelsen, B. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999

2. Variabel persepsi masyarakat.

Tabel 3.2
Operasionalisasi Persepsi Masyarakat

| Variabel | Dimensi | Indikator | Skala |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| Persepsi masyarakat | Bentuk dan Latar Belakang | 1. Pesan yang harus diikuti. | Interval |
| | | 2. Tulisan yang ditulis tepat dan mudah dibaca. | Interval |
| | | 3. Pesan tertulis yang harus ditaati | Interval |
| | Interpretasi | 4. Masyarakat lebih mengerti dan mengingat pesan-pesan tersebut. | Interval |
| | | 5. Mempengaruhi kebiasaan merokok di kawasan umum. | Interval |

Sumber : Marhaeni Fajar. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2008

3. Variabel efektifitas kebijakan publik.

Tabel 3.3

Operasionalisasi Efektifitas kebijakan publik.

| Variabel | Dimensi | Faktor/Indikator | Skala |
|------------------------------|-----------|--------------------|----------|
| Efektifitas kebijakan publik | Internal | 1. Human resources | Interval |
| | | 2. Finances | Interval |
| | | 3. Logistics | Interval |
| | | 4. Information | Interval |
| | | 5. Legitimacy | Interval |
| | | 6. Participation | Interval |
| | Eksternal | 7. Konstitusional | Interval |
| | | 8. Kolektif | Interval |
| | | 9. Operasional | Interval |
| | | 10. Distirbusi | Interval |

Sumber : Zainal Abidin Said, *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Yayasan Pancur Siwah, 2002

3.5. Jenis, Sumber dan Pengumpulan Data.

3.5.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada kajian ini adalah menggunakan data primer yakni data yang asli, informasi dari tangan pertama atau responden. Misalnya dari individu atau perorangan, seperti: data yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner. Data ini merupakan data mentah yang kelak akan diproses sesuai dengan kebutuhan.

3.5.2. Sumber Data.

1. Populasi.

Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Jakarta Barat. Populasi terjangkaunya adalah masyarakat yang berada disekitar tempat layanan umum (publik) Jakarta Barat.

2. Sampel.

Husen Umar mengatakan bahwa desain penelitian (*research design*) merupakan suatu cetak biru (*blue print*) bagaimana data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis. Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner. Sehingga data yang dipakai adalah data Primer. Sedangkan dalam menentukan sampel yang representatif, digunakan salah satu jenis teknik sampling Non-Probability Sampling dimana teknik ini tidak memberikan kesempatan (peluang) pada setiap anggota populasi untuk dijadikan anggota sampel. Tehnik yang digunakan adalah **Purposive Sampling** (sampling pertimbangan), yaitu teknik sampling yang digunakan karena peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu.³² Jumlah kawasan dilarang merokok yang ditarik sebagai sample adalah 10 objek kawasan dilarang merokok ditentukan berdasarkan lokasi. Adapun yang menjadi pertimbangan penentuan sampling dalam penelitian ini adalah objek yang memiliki kawasan dilarang merokok dan memiliki bagian dari segi Ekonomi, Sosial, maupun ekologi.

Kedua, menarik sample yang dijadikan responden dengan teknik *quots random sampling* yakni dengan menarik sample secara acak sesuai dengan jatahnya untuk masing-masing lokasi. Untuk menentukan jumlah sample responden yang layak bagi penulisan ini, digunakan rumus dari Hair yang menyebutkan “*As a general rate, the minimum is to have at least five times as many observations as there are variable to be analyzed*”.³³ Dimana jumlah minimum sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah paling tidak 5 (lima) kali dari jumlah pertanyaan. Oleh

³² *Ibid.* hal. 30, 106.

³³ Hair, F. Joseph, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatum, William C. Black, *Fifth Edition, Multivariate Data Analysis*, Prentice Hall, New Jersey, 1998, h. 98-99

karena jumlah pertanyaan yang ada dalam kuesioner berjumlah 22 pertanyaan, maka jumlah sample yang diambil dari responden adalah 22×5 yaitu berjumlah 110 sampel, jadi penulis mengambil jumlah sample sebanyak 120 responden. Objek dan distribusi penyebaran sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
Objek distribusi penyebaran sampel

| No | Lokasi | Jumlah Sampel |
|-----------|------------------------------------|----------------------|
| 1 | Walikota Jakarta Barat | 8 |
| 2 | Kecamatan Grogol Petamburan | 8 |
| 3 | Kantor PLN Jakarta Barat | 8 |
| 4 | Kantor PAM Jakarta Barat | 8 |
| 5 | Kandatel Jakarta Barat | 8 |
| 6 | RS Sumber Waras | 8 |
| 7 | RS Harapan Kita | 8 |
| 8 | Mall Taman Anggrek | 8 |
| 9 | Mall Ciputra | 8 |
| 10 | Koridor Busway Jelambar | 8 |
| 11 | Terminal Kali Deres | 8 |
| 12 | Gereja Maria Bunda Karmel | 8 |
| 13 | Masjid Al - Isro | 8 |
| 14 | Universitas Indonusa Esa Unggul | 8 |
| 15 | SMU YADIKA 1 | 8 |
| | Jumlah | 120 |

3.5.3. Pengumpulan Data.

Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini terkait dengan kondisi ketiga variable yang diatas, data ini dikumpulkan dengan teknik :

1. Teknik Penelitian Lapangan.

Teknik penalitaian ini dilakukan dengan turun langsung ke lapangan (*survei*) dengan menggunakan alat pengumpulan data kuesioner.

2. Teknik Penelitian Kepustakaan.

Teknik ini dilakukan untuk mendukung gagasan teoritik atau koseptual mengenai variable-variabel penelitian yang dalam hal ini didukung dengan alat pengumpulan data melalui buku-buku teks atau literature dan dokumen-dokumen atau berupa arsip-arsip kejadian atau peristiwa dari berbagai kegiatan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini.

3. Observasi.

Pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. Dalam hal ini penulis berusaha secara langsung berkunjung ke objek-objek penelitian untuk mendapat data-data tambahan yang mungkin diperlukan untuk melengkapi analisis penelitian.

3.6. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tiga buah instrument, yaitu instrument pengukur :

1. Partisipas masyarakat
2. Persepsi masyarakat
3. Efektifitas Kebijakan publik

Instrument tersebut disusun dalam bentuk angket yang menyediakan lima opsi pilihan. Alternative pilihan yang disediakan terdiri atas, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Untuk pernyataan positif, masing-masing pilihan ini diberi bobot penilaian 5 untuk pilihan

“sangat setuju”, 4 untuk pilihan “setuju”, 3 untuk pilihan “kurang setuju”, 2 untuk pilihan “tidak setuju” dan 1 untuk pilihan “sangat tidak setuju”.

Setelah penyusunan kuesioner maka langkah selanjutnya adalah melakukan kalibrasi dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas :

1. Uji validitas dan reliabilitas.

a. Validitas (keabsahan)

Adalah pertanyaan sampel sejauh mana suatu alat pengukur itu mampu mengukur apa yang ingin diukur. Alat ukur yang digunakan dalam pengujian validitas kuesioner adalah angka hasil korelasi antara skor pertanyaan dan skor keseluruhan pertanyaan responden terhadap informasi dalam kuesioner.

Variabel instrumen diuji dengan menggunakan koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total melalui teknik korelasi *product moment*. Analisa dilakukan terhadap semua butir instrumen kriteria pengujian ditetapkan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} ($r_{hitung} > r_{tabel}$), maka instrumen dianggap valid.

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana : r = Product Moment Correlation

n = Jumlah sampel

X = Skor butir

Y = Skor total

b. Reliabilitas (konsistensi)

Adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Teknik perhitungan menurut Husein Umar dalam bukunya Metode Riset Ilmu Administrasi menggunakan teknik *Cronbach's Alpha (a)*, yaitu teknik perhitungan untuk mencari nilai reliabilitas yang

skornya bukan 0-1, tetapi merupakan rentangan antara beberapa nilai, misalnya 0-10 atau 0-100 atau bentuk skala 1-3, 1-5 atau 1-7 dan seterusnya dapat menggunakan *Cronbach's Alpha* (α).³⁴

Perhitungan validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan *software Statistic Product Service Solution* (SPSS) Versi 16.00 untuk mempercepat pekerjaan penulis.

2. Pengujian model.

a. Normalitas

Salah satu cara untuk mengecek apakah model regresi linier berganda, variabel independen atau dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak adalah dengan plot probabilitas normal menggunakan SPSS. Model yang baik adalah data berdistribusi normal atau mendekati normal.

b. Multikolinearitas.

Kolinearitas ganda berarti adanya hubungan linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Bila hubungan antara variabel independent sangat tinggi, umumnya akan terjadi multikolinearitas

c. Heterokedastitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Heterokedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan variasi variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak random (acak).

3. Analisa Regresi

Digunakan regresi linear untuk melakukan pengujian pengaruh sebuah variabel dependen dengan satu atau beberapa variabel independen yang ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Jika variabel dependen

³⁴ Husein Umar. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hal. 95

dihubungkan dengan satu variabel independen saja, persamaan regresi yang dihasilkan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 16.00.

Adapun rumus regresi adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Dimana : Y = variabel tergantung (*dependent*)

X = variabel bebas (*independent*)

a = nilai konstanta

b = koefisien arah regresi

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Responden yang Merokok

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengguna/pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah yaitu:

4.1.1 Gambaran umum responden berdasarkan umur

Tabel 4.1
Gambaran umum responden berdasarkan umur

| | Frequency | Percent |
|------------------|-----------|---------|
| Valid 21-29.5 th | 31 | 37.8 |
| 29.6-38 th | 28 | 34.2 |
| 38.1-46.5 th | 13 | 15.8 |
| 46.6-55 th | 10 | 12.2 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa responden yang berusia 21-29.5 tahun sebanyak 31 responden (37.8%), 29.6-38 tahun sebanyak 28 responden (34.2%), 38.1-46.5 tahun sebanyak 13 responden (15.8%), 46.6-55 tahun sebanyak 10 responden (12.2%). Hal ini dapat dilihat bahwa para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah tertinggi adalah berusia 21-29.5 tahun.

4.1.2 Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin

| | Frequency | Percent |
|-----------------|-----------|---------|
| Valid Laki-laki | 77 | 93.9 |
| Perempuan | 5 | 6.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 77 responden (93.9%) dan perempuan sebanyak 5 responden (6.1%). Hal ini dapat dilihat bahwa para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah tertinggi adalah laki-laki.

4.1.3 Responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.3
Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan

| | Frequency | Percent |
|------------|-----------|---------|
| Valid SLTP | 7 | 8.5 |
| SLTA | 41 | 50.0 |
| D3 | 10 | 12.2 |
| S1 | 22 | 26.8 |
| S2 | 2 | 2.5 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa responden yang berpendidikan SLTP sebanyak 7 responden (8.5%), SLTA sebanyak 41 responden (50.0%), D3 sebanyak 10 responden (12.2%), S1 sebanyak 22 responden (26.8%), dan S2 sebanyak 2 responden (2.5%). Hal ini dapat dilihat bahwa para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah tertinggi adalah berpendidikan SLTA.

4.1.4 Deskripsi Data Penelitian

Data dalam penelitian ini termasuk data sekunder yang diperoleh dari para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah. Data yang diperoleh diolah menjadi data kuantitatif baik untuk data variabel independen maupun data variabel dependen.

4.1.4.1 Variabel Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.3
Warga masyarakat dengan sukarela memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 36 | 43.9 |
| | Setuju | 40 | 48.8 |
| | Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 36 responden (43.9%), setuju sebanyak 40 responden (48.8%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (2.4%). Dari jawaban responden tentang setiap warga masyarakat dengan sukarela memebrikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.4
Warga masyarkat memelihara dan meningkatkan kualtias udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 35 | 42.7 |
| | Setuju | 36 | 43.9 |
| | Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 35 responden (42.7%), setuju sebanyak 36 responden (43.9%) dan sangat setuju sebanyak 7

responden (8.5%). Dari jawaban responden tentang setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.5
Perangkat daerah menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok disetiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 5 | 6.1 |
| Ragu-ragu | 31 | 37.8 |
| Setuju | 38 | 46.3 |
| Sangat Setuju | 8 | 9.8 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 5 responden (6.1%), ragu-ragu sebanyak 31 responden (37.8%), setuju sebanyak 38 responden (46.3%) dan sangat setuju sebanyak 8 responden (9.8%). Dari jawaban responden tentang perangkat daerah menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok disetiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.6
Masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 2 | 2.4 |
| Ragu-ragu | 34 | 41.5 |
| Setuju | 41 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 5 | 6.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 2 responden (2.4%), ragu-ragu sebanyak 34 responden (41.5%), setuju sebanyak 41 responden (50.0%) dan sangat setuju sebanyak 5

responden (6.1%). Dari jawaban responden tentang perangkat daerah menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok disetiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.7
Gubernur memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 27 | 32.9 |
| Setuju | 43 | 52.4 |
| Sangat Setuju | 8 | 9.8 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 27 responden (32.9%), setuju sebanyak 43 responden (52.4%) dan sangat setuju sebanyak 8 responden (9.8%). Dari jawaban responden tentang Gubernur memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.8
Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan penyuluhan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 3 | 3.7 |
| Ragu-ragu | 22 | 26.8 |
| Setuju | 51 | 62.2 |
| Sangat Setuju | 6 | 7.3 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 3 responden (3.7%), ragu-ragu sebanyak 22 responden (26.8%), setuju sebanyak 51 responden (62.2%) dan sangat setuju sebanyak 6 responden (7.3%). Dari jawaban responden tentang perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan penyuluhan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

4.1.4.2 Variabel Persepsi Masyarakat

Tabel 4.9
Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 11 | 13.4 |
| Ragu-ragu | 26 | 31.7 |
| Setuju | 31 | 37.8 |
| Sangat Setuju | 14 | 17.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 11 responden (13.4%), ragu-ragu sebanyak 26 responden (31.7%), setuju sebanyak 31 responden (37.8%) dan sangat setuju sebanyak 14 responden (17.1%). Dari jawaban responden tentang tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.10
Tulisan yang ditulis dapat dan mudah dibaca

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 23 | 28.0 |
| | Setuju | 40 | 48.8 |
| | Sangat Setuju | 15 | 18.3 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 23 responden (28.0%), setuju sebanyak 40 responden (48.8%) dan sangat setuju sebanyak 15 responden (18.3%). Dari jawaban responden tentang tulisan yang ditulis dapat dan mudah dibaca tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.11
Gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan atau dimengerti

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 29 | 35.4 |
| | Setuju | 31 | 37.8 |
| | Sangat Setuju | 18 | 22.0 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 29 responden (35.4%), setuju sebanyak 31 responden (37.8%) dan sangat setuju sebanyak 18 responden (22.0%). Dari jawaban responden tentang gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan atau dimengerti tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.12
Penandaan atau petunjuk yang ada harus ditaati

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| | Tidak Setuju | 5 | 6.1 |
| | Ragu-ragu | 24 | 29.3 |
| | Setuju | 41 | 50.0 |
| | Sangat Setuju | 11 | 13.4 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,2%), tidak setuju sebanyak 5 responden (6.1%), ragu-ragu sebanyak 24 responden (29.3%), setuju sebanyak 41 responden (50.0%) dan sangat setuju sebanyak 11 responden (13.4%). Dari jawaban responden tentang penandaan atau petunjuk yang ada harus ditaati tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.13
Tanda dan petunjuk yang ada mudah diingat dan dimengerti

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 3 | 3.7 |
| | Ragu-ragu | 36 | 43.9 |
| | Setuju | 29 | 35.4 |
| | Sangat Setuju | 14 | 17.1 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 3 responden (3.7%), ragu-ragu sebanyak 36 responden (43.9%), setuju sebanyak 29 responden (35.4%) dan sangat setuju sebanyak 14 responden (17.1%). Dari jawaban responden tentang tanda dan petunjuk yang ada mudah diingat dan dimengerti tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.14
Dengan adanya Kawasan Dilarang Merokok mempengaruhi
kebiasaan merokok di kawasan umum

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 10 | 12.2 |
| | Ragu-ragu | 31 | 37.8 |
| | Setuju | 30 | 36.6 |
| | Sangat Setuju | 11 | 13.4 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 10 responden (12.2%), ragu-ragu sebanyak 31 responden (37.8%), setuju sebanyak 30 responden (36.6%) dan sangat setuju sebanyak 11 responden (13.4%). Dari jawaban responden tentang dengan adanya Kawasan Dilarang Merokok mempengaruhi kebiasaan merokok di kawasan umum tertinggi yaitu ragu-ragu.

4.1.4.3 Variabel Efektifitas kebijakan publik

Tabel 4.15
Pengaturan Kawasan Dilarang Merokok sebagai upaya menciptakan
udara yang sehat dan bersih

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 9 | 11.0 |
| | Ragu-ragu | 20 | 24.4 |
| | Setuju | 46 | 56.1 |
| | Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 9 responden (11.0%), ragu-ragu sebanyak 20 responden (24.4%), setuju sebanyak 46 responden (56.1%) dan sangat setuju sebanyak 7 responden (8.5%). Dari jawaban responden tentang pengaturan

Kawasan Dilarang Merokok sebagai upaya menciptakan udara yang sehat dan bersih tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.16
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 8 | 9.8 |
| | Ragu-ragu | 28 | 34.1 |
| | Setuju | 44 | 53.7 |
| | Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 8 responden (9.8%), ragu-ragu sebanyak 28 responden (34.1%), setuju sebanyak 44 responden (53.7%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (2.4%). Dari jawaban responden tentang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.17
Untuk udara yang sehat dan bersih diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| | Ragu-ragu | 23 | 28.0 |
| | Setuju | 58 | 70.7 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (1.2%), ragu-ragu sebanyak 23 responden (28.0%) dan setuju sebanyak 58 responden (70.7%). Dari jawaban responden

tentang untuk udara yang sehat dan bersih diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.18
Rokok adalah merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat sekitar

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 25 | 30.5 |
| | Setuju | 52 | 63.4 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 25 responden (30.5%), setuju sebanyak 52 responden (63.4%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (1.2%). Dari jawaban responden tentang rokok adalah merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat sekitar tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.19
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan wajib menerapkan kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 7 | 8.5 |
| | Ragu-ragu | 16 | 19.5 |
| | Setuju | 52 | 63.4 |
| | Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 7 responden (8.5%), ragu-ragu sebanyak 16 responden (19.5%), setuju sebanyak 52 responden (63.4%) dan sangat setuju sebanyak 7 responden (8.5%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan wajib menerapkan kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.20
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan kawasan dilarang merokok

| | Frequency | Percent |
|---------------------------|-----------|---------|
| Valid Sangat Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| Tidak Setuju | 9 | 11.0 |
| Ragu-ragu | 21 | 25.6 |
| Setuju | 49 | 59.8 |
| Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,2%), tidak setuju sebanyak 9 responden (11.0%), ragu-ragu sebanyak 21 responden (25.6%), setuju sebanyak 49 responden (59.8%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (2.4%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu ragu-ragu dan setuju.

Tabel 4.21
Pimpinan dan/atau penanggung jawab telah memberikan contoh ditempat yang menjadi tanggung jawabnya di kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| | Tidak Setuju | 8 | 9.8 |
| | Ragu-ragu | 32 | 39.0 |
| | Setuju | 40 | 48.8 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan sangat tidak setuju sebanyak 1 responden (1,2%), tidak setuju sebanyak 8 responden (9.8%), ragu-ragu sebanyak 32 responden (39.0%), setuju sebanyak 40 responden (48.8%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (1.2%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab telah memberikan contoh ditempat yang menjadi tanggung jawabnya di kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.22
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 14 | 17.1 |
| | Setuju | 63 | 76.8 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (4.9%), ragu-ragu sebanyak 14 responden (17.1%), setuju sebanyak 63 responden (76.8%) dan sangat setuju sebanyak 1

responden (1.2%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.23
Pimpinan dan/atau penanggung jawab, wajib menegur, mengingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti merokok ditempat umum

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 2.4 |
| | Ragu-ragu | 21 | 25.6 |
| | Setuju | 58 | 70.7 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 2 responden (2.4%), ragu-ragu sebanyak 21 responden (25.6%), setuju sebanyak 58 responden (70.7%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (1.2%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab, wajib menegur, mengingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti merokok ditempat umum tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.24
Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan lingkungannya

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Ragu-ragu | 25 | 30.5 |
| | Setuju | 52 | 63.4 |
| | Sangat Setuju | 5 | 6.1 |
| | Total | 82 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan ragu-ragu sebanyak 25 responden (30,5%), setuju sebanyak 52 responden (63.4%) dan sangat setuju sebanyak 5 responden (6.1%). Dari jawaban responden tentang setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan lingkungannya tertinggi yaitu setuju.

Secara deskripsi statistik dari jumlah jawaban variabel partisipasi, persepsi masyarakat dan efektifitas kebijakan publik yaitu :

Tabel 4.25
Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Variance |
|------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Kebijakan Publik | 82 | 2.40 | 4.60 | 3.6293 | .36158 | .131 |
| Partisipasi Masyarakat | 82 | 2.33 | 4.67 | 3.6582 | .57029 | .325 |
| Persepsi Masyarakat | 82 | 2.50 | 4.50 | 3.5976 | .37499 | .141 |
| Valid N (listwise) | 82 | | | | | |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa jumlah responden sebanyak 82 orang, rata-rata jawaban variable efektifitas kebijakan publik sebesar 3.6293 dengan standar deviasi 0.36158 sedangkan partisipasi masyarakat sebesar 3.6582 dengan standar deviasi 0.57029 dan persepsi masyarakat sebesar 3.5976 dengan standar deviasi 0.37499. Jumlah minimum jawaban variable kebijakan public sebesar 2.40 dan maksimum 4.60 sedangkan partisipasi masyarakat minimum 2.33 dan maksimum sebesar 4.67 dan persepsi masyarakat minimum 2.50 dan maksimum 4.50.

4.1.5 Validitas dan Reliabilitas Data

4.1.5.1 Uji Validitas

Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.26
Validitas Partisipasi Masyarakat

| | Hasil Validasi | p-value | Kesimpulan |
|-------------|----------------|---------|------------|
| Sukarela | .642 | .000 | Valid |
| Kemauan | .507 | .000 | Valid |
| Inisiatif | .600 | .000 | Valid |
| Monitoring | .487 | .000 | Valid |
| Perubahan | .700 | .000 | Valid |
| Pembangunan | .500 | .000 | Valid |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Setelah dilakukan analisis item pada variabel partisipasi masyarakat, maka didapatkan 6 item dinyatakan valid. Hasil tersebut didasarkan oleh perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dimana taraf signifikansi nya 5%. Dari data r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 82$ adalah sebesar 0.220.

Maka dapat diperhatikan pada tabel correlation diatas pada bagian total *Pearson Correlation (r)* bahwa tidak terdapat angka dibawah nilai 0.220, dengan demikian semua jawaban dari kuesioner yang disebar semuanya mewakili.

Persepsi Masyarakat

Tabel 4.27
Validitas Persepsi Masyarakat

| | Hasil Validasi | p-value | Kesimpulan |
|------------------------------------|----------------|---------|------------|
| dilengkapi penandaan atau petunjuk | .720 | .000 | Valid |
| Pesan harus diikuti | .548 | .000 | Valid |
| Tepat dan mudah dibaca | .659 | .000 | Valid |
| Pesan harus ditaati | .547 | .000 | Valid |
| Mengerti dan mengingat | .651 | .000 | Valid |
| Mempengaruhi kebiasaan merokok | .787 | .000 | Valid |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Setelah dilakukan analisis item pada variabel persepsi masyarakat, maka didapatkan 6 item dinyatakan valid. Hasil tersebut didasarkan oleh perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dimana taraf signifikansi nya 5%. Dari data r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 82$ adalah sebesar 0.220.

Maka dapat diperhatikan pada tabel correlation diatas pada bagian total *Pearson Correlation (r)* bahwa tidak terdapat angka dibawah nilai 0.220, dengan demikian semua jawaban dari kuesioner yang disebar semuanya mewakili.

Efektifitas kebijakan publik

Tabel 4.28
Validitas Efektifitas kebijakan publik

| | Hasil Validasi | p-value | Kesimpulan |
|--------------------|----------------|---------|------------|
| Pengaturan | .562 | .000 | Valid |
| Pertimbangan | .586 | .000 | Valid |
| Kemampuan | .510 | .000 | Valid |
| Bahaya rokok | .681 | .000 | Valid |
| Wajib menerapkan | .749 | .000 | Valid |
| Wajib memasang | .581 | .000 | Valid |
| Memberi contoh | .688 | .000 | Valid |
| Menampilkan data | .377 | .000 | Valid |
| Wajib Mengingatkan | .494 | .005 | Valid |
| Bimbingan | | .000 | Valid |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Setelah dilakukan analisis item pada variabel efektifitas kebijakan publik, maka didapatkan 10 item dinyatakan valid. Hasil tersebut didasarkan oleh perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dimana taraf signifikansi nya 5%. Dari data r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 82$ adalah sebesar 0.220.

Maka dapat diperhatikan pada tabel correlation diatas pada bagian total *Pearson Correlation (r)* bahwa tidak terdapat angka dibawah nilai 0.220, dengan demikian semua jawaban dari kuesioner yang disebar semuanya mewakili.

4.1.6 Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Tingkat reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha (α)* diukur berdasarkan skala *alpha* 0 sampai dengan 1. Apabila skala tersebut dikelompokkan ke dalam kelas dengan range yang sama, maka melihat ukuran kemantapan dan tingkat reliabel berdasarkan nilai *alpha* dapat diinterpretasikan seperti tabel berikut :

| Angka Reliabel | Keterangan |
|---------------------------|-----------------|
| 0,00 sampai dengan 0,20 | Kurang Reliabel |
| > 0,20 sampai dengan 0,40 | Agak reliabel |
| > 0,40 sampai dengn 0,60 | Cukup Reliabel |
| > 0,60 sampai dengan 0,80 | Reliabel |
| > 0,80 sampai dengan 1,00 | Sangat Reliabel |

Variabel Partisipasi Masyarakat

Reliability Coefficients

| | |
|-----------------|----------------|
| N of Cases = 82 | N of Items = 6 |
| Alpha = .603 | |

Hasil perhitungan variabel partisipasi masyarakat dengan menggunakan SPSS 16.00 diatas menunjukkan bahwa jumlah

responden sebanyak 82 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan didapatkan *Cronbach's alpha* (α) sebesar 0.603. Dengan demikian variabel diatas adalah reliabel.

Variabel Persepsi Masyarakat

Reliability Coefficients

| | |
|-----------------|----------------|
| N of Cases = 82 | N of Items = 6 |
| Alpha = .733 | |

Hasil perhitungan variabel persepsi masyarakat dengan menggunakan SPSS 16.00 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 82 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan didapatkan *Cronbach's alpha* (α) sebesar 0.733. Dengan demikian variabel diatas adalah reliabel.

Variabel Efektifitas kebijakan publik

Reliability Coefficients

| | |
|-----------------|-----------------|
| N of Cases = 82 | N of Items = 10 |
| Alpha = .735 | |

Hasil perhitungan variabel efektifitas kebijakan publik dengan menggunakan SPSS 16.00 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 82 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan dan didapatkan *Cronbach's alpha* (α) sebesar 0.735. Dengan demikian variabel diatas adalah reliabel.

4.1.7 Normalitas Data

Uji statistik yang dapat di gunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Uji Kolmogorov-Smirnov di lakukan dengan membuat hipotesis:

H₀ : data residual berdistribusi normal

H₁ : data residual tidak berdistribusi normal

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak di bawah ini :

Tabel 4.29
Uji Normalitas Data

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| N | | 82 | 82 | 82 |
| Normal Parameters ^a | Mean | 3.6293 | 3.6582 | 3.5976 |
| | Std. Deviation | .36158 | .57029 | .37499 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .187 | .125 | .129 |
| | Positive | .129 | .125 | .109 |
| | Negative | -.187 | -.087 | -.129 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.095 | 1.136 | 1.169 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .086 | .151 | .130 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan dari uji normalitas data variabel efektifitas kebijakan publik sebesar 0.086. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0.05, nilai signifikan dari uji normalitas variable kebijakan publik sebesar 0.086 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H₀ diterima atau dengan kata lain distribusi data variabel kebijakan public merupakan data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan dari uji normalitas data variabel partisipasi masyarakat sebesar 0.151. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0.05, nilai signifikan dari uji normalitas variable partisipasi sebesar 0.151 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H₀

diterima atau dengan kata lain distribusi data variabel partisipasi masyarakat merupakan data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan dari uji normalitas data variabel persepsi masyarakat sebesar 0.130. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0.05, nilai signifikan dari uji normalitas variable persepsi sebesar 0.130 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dengan kata lain distribusi data variabel persepsi masyarakat merupakan data berdistribusi normal

4.1.8 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi pada model regresi apabila pada variabel terdapat pasangan variabel bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain. Apabila pada regresi terdeteksi adanya kasus multikolinearitas, maka dapat terjadi perubahan tanda koefisien regresi dari positif pada saat diuji dengan regresi sederhana, menjadi negatif pada saat diuji dengan regresi berganda atau sebaliknya. Disamping itu, multikolinearitas dapat menyebabkan fluktuasi yang besar pada prediksi koefisien regresi dan juga dapat menyebabkan penambahan variabel independen yang tidak berpengaruh sama sekali.

Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolinearitas apabila nilai VIF menjauhi 1 atau tolerance menjauhi 1.

Tabel 4.30
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Partisipasi Masyarakat | .953 | 1.049 |
| Persepsi Masyarakat | .953 | 1.049 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16

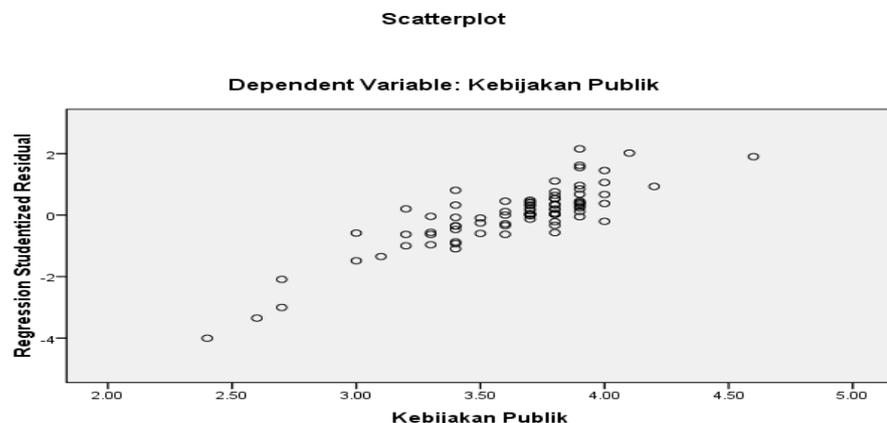
Dari hasil olahan SPSS hasil test diatas, didapat bahwa VIF dan tolerance antara variabel partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat pengelola keuangan memiliki nilai sama, yaitu $VIF = 1.049$ dan $tolerance = 0.963$. Baik VIF maupun tolerance mendekati 1 sehingga model regresi masih tidak terdeteksi multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya model regresi diatas memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang multikolinearitas.

4.1.9 Uji Heterokedastitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Heterokedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan varians variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak random (acak).

Heterokedastisitas dapat terjadi karena dinamika lingkungan dan data variabel yang sulit diidentifikasi pada saat membuat model regresi sehingga muncul asumsi bahwa regresi sebaiknya terbebas dari heteroskedastisitas.

Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas tersebut berdasarkan diagram scatter plot :



Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan diagram scatter plot diatas dilihat bahwa suatu regresi dikatakan terdeteksi heterokedastisitasnya apabila diagram pencar residual membentuk pola tertentu. Tampak pada diagram diatas diagram pencar, bahwa residual tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa regresi terbebas dari kasus heterokedastisitas.

4.1.10 Pengujian Hipotesis

Dari hasil olah data uji regresi sederhana ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Pearson Correlation | Kebijakan Publik | 1.000 | .402 | .406 |
| | Partisipasi Masyarakat | .402 | 1.000 | .216 |
| | Persepsi Masyarakat | .406 | .216 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kebijakan Publik | . | .000 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .000 | . | .025 |
| | Persepsi Masyarakat | .000 | .025 | . |
| N | Kebijakan Publik | 82 | 82 | 82 |
| | Partisipasi Masyarakat | 82 | 82 | 82 |
| | Persepsi Masyarakat | 82 | 82 | 82 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Dari hasil korelasi diatas tampak bahwa korelasi antara partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik = 0.402 dengan tingkat signifikansi = 0.000 maka keadaan ini menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikans.

Korelasi antara persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik = 0.406 dengan tingkat signifikansi 0.000 maka keadaan ini menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikans.

1. Pengaruh korelasi partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

Mengetahui nilai t hitung dari pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah :

t hitung = 3.341, dimana

r = hasil korelasi partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

n = jumlah responden

Dapat diketahui t hitung = 3.341 (dari perhitungan t hitung coefficients diatas) sedangkan pada t tabel = 2.000.

Jadi t hitung 3.341 > t tabel 2.000 dengan demikian H_0 : ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara korelasi partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik.

2. Pengaruh korelasi persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

Mengetahui nilai t hitung dari pengaruh persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah :

t hitung = 3.396, dimana

r = hasil korelasi persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

n = jumlah responden

Dapat diketahui t hitung = 3.396 (dari perhitungan t hitung coefficients diatas) sedangkan pada t tabel = 2.000.

Jadi t hitung 3.396 > t tabel 2.000 dengan demikian H_0 : ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara korelasi persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik.

3. Pengaruh korelasi partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja efektifitas kebijakan publik

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .518 ^a | .268 | .250 | .31318 |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Pada bagian ini menunjukkan pasangan korelasi kedua variabel partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah sebesar 0.518. Sedangkan R^2 (indek determinasi) adalah 0.268. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan dari hubungan secara bersama-sama (multi regression) antara partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah sebesar 51.8%. Selebihnya sebesar 48.2% dipengaruhi oleh faktor lain.

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 2.841 | 2 | 1.421 | 14.483 | .000 ^a |
| | Residual | 7.749 | 79 | .098 | | |
| | Total | 10.590 | 81 | | | |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Uji ANOVA (*analysis of variance*) untuk menguji ada tidaknya pengaruh kedua variable independent terhadap variable dependent (multi regression). Dapat diperhatikan bahwa F pada tabel anova diatas adalah 14.483. Sedang F tabel (α 0,05), (numerator = 2 dan denominator = 79) adalah 1.65

Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (α 0,05).

Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan publik.

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.704 | .370 | | 4.611 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .209 | .063 | .329 | 3.341 | .001 |
| | Persepsi Masyarakat | .323 | .095 | .335 | 3.396 | .001 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Dari tabel diatas dapat dibuat model persamaannya yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + c_2X_2$$

$$Y = 1.704 + 0.209 X_1 + 0.323 X_2$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa efektifitas kebijakan publik akan berhasil apabila partisipasi masyarakat ditingkatkan, dan apabila persepsi masyarakat ditingkatkan maka efektifitas kebijakan publik akan meningkat pula.

4.2 Analisis Hasil Penelitian Berdasarkan Responden yang Tidak Merokok

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah yaitu:

4.2.1 Gambaran umum responden berdasarkan umur

Tabel 4.1
Gambaran umum responden berdasarkan umur

| | Frequency | Percent |
|------------------|-----------|---------|
| Valid 21-29.5 th | 15 | 39.4 |
| 29.6-38 th | 12 | 31.5 |
| 38.1-46.5 th | 6 | 15.6 |
| 46.6-55 th | 4 | 10.5 |
| Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa responden yang berusia 21-29.5 tahun sebanyak 15 responden (39.4%), 29.6-38 tahun sebanyak 12 responden (31.5%), 38.1-46.5 tahun sebanyak 6 responden (15.6%), 46.6-55 tahun sebanyak 4 responden (10.5%). Hal ini dapat dilihat bahwa para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah tertinggi adalah berusia 21-29.5 tahun.

4.2.2 Responden berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.2
Gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin

| | | Frequency | Percent |
|-------|-----------|-----------|---------|
| Valid | Laki-laki | 30 | 78.9 |
| | Perempuan | 8 | 21.1 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 responden (78.9%) dan perempuan sebanyak 8 responden (21.1%). Hal ini dapat dilihat bahwa para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah tertinggi adalah laki-laki.

4.2.3 Responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.3
Gambaran umum responden berdasarkan pendidikan

| | | Frequency | Percent |
|-------|-------|-----------|---------|
| Valid | SLTP | 0 | 0 |
| | SLTA | 1 | 2.7 |
| | D3 | 12 | 31.5 |
| | S1 | 19 | 50.0 |
| | S2 | 6 | 15.8 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa responden yang berpendidikan SLTA sebanyak 1 responden (2.7%), D3 sebanyak 12 responden (31.5%), S1 sebanyak 19 responden (50.0%), dan S2 sebanyak 6 responden (15.8%). Hal ini dapat dilihat bahwa para pengguna/ pengunjung di kawasan busway, terminal bus, stasiun, mall, perkantoran, tempat pendidikan, tempat ibadah tertinggi adalah berpendidikan SLTA.

4.2.3.1 Variabel Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.31
Setiap warga masyarakat dengan sukarela memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| | Ragu-ragu | 13 | 34.2 |
| | Setuju | 21 | 55.3 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 2 responden (5.3%), ragu-ragu sebanyak 13 responden (34.2%), setuju sebanyak 21 responden (55.3%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (5.3%). Dari jawaban responden tentang setiap warga masyarakat dengan sukarela memebrikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.32
Setiap warga masyarkat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualtias udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 17 | 44.7 |
| | Setuju | 16 | 42.1 |
| | Sangat Setuju | 4 | 10.5 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 17 responden (44.7%), setuju sebanyak 16 responden (42.1%) dan sangat setuju sebanyak 4 responden (10.5%). Dari jawaban responden tentang setiap warga

masyarakat berkewajiban memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.33
Perangkat daerah menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok di setiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 22 | 57.9 |
| | Setuju | 10 | 26.3 |
| | Sangat Setuju | 5 | 13.2 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 22 responden (57.9%), setuju sebanyak 10 responden (26.3%) dan sangat setuju sebanyak 5 responden (13.2%). Dari jawaban responden tentang perangkat daerah menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok di setiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.34
Masing-masing perangkat daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 6 | 15.8 |
| | Ragu-ragu | 15 | 39.5 |
| | Setuju | 13 | 34.2 |
| | Sangat Setuju | 4 | 10.5 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 6 responden (15.8%), ragu-ragu sebanyak 15 responden (39.5%), setuju sebanyak 13 responden (34.2%) dan sangat setuju sebanyak 4 responden (10.5%). Dari jawaban responden tentang perangkat daerah

menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok disetiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.35
Gubernur memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 23 | 60.5 |
| | Setuju | 10 | 26.3 |
| | Sangat Setuju | 4 | 10.5 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 23 responden (60.5%), setuju sebanyak 10 responden (26.3%) dan sangat setuju sebanyak 4 responden (10.5%). Dari jawaban responden tentang Gubernur memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.36
Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan penyuluhan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| | Ragu-ragu | 13 | 34.2 |
| | Setuju | 21 | 55.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (10.5%), ragu-ragu sebanyak 13 responden (34.2%) dan setuju sebanyak 21 responden (55.3%). Dari jawaban responden tentang perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan penyuluhan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

4.2.3.2 Variabel Persepsi Masyarakat

Tabel 4.37
Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| Ragu-ragu | 16 | 42.1 |
| Setuju | 11 | 28.9 |
| Sangat Setuju | 7 | 18.4 |
| Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (10.5%), ragu-ragu sebanyak 16 responden (42.1%), setuju sebanyak 11 responden (28.9%) dan sangat setuju sebanyak 7 responden (18.4%). Dari jawaban responden tentang tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.38
Tulisan yang ditulis dapat dan mudah dibaca

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 18.4 |
| Ragu-ragu | 11 | 28.9 |
| Setuju | 13 | 34.2 |
| Sangat Setuju | 7 | 18.4 |
| Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 7 responden (18.4%), ragu-ragu sebanyak 11 responden (28.9%), setuju sebanyak 13 responden (34.2%) dan sangat setuju sebanyak 7 responden (18.4%). Dari jawaban responden tentang tulisan yang ditulis dapat dan mudah dibaca tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.39
Gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan atau dimengerti

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 18.4 |
| Ragu-ragu | 14 | 36.8 |
| Setuju | 9 | 23.7 |
| Sangat Setuju | 8 | 21.1 |
| Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 7 responden (18.4%), ragu-ragu sebanyak 14 responden (36.8%), setuju sebanyak 9 responden (23.7%) dan sangat setuju sebanyak 8 responden (21.1%). Dari jawaban responden tentang gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan atau dimengerti tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.40
Penandaan atau petunjuk yang ada harus ditaati

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 26.3 |
| Ragu-ragu | 13 | 34.2 |
| Setuju | 8 | 21.1 |
| Sangat Setuju | 7 | 18.4 |
| Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 10 responden (26.3%), ragu-ragu sebanyak 13 responden (34.2%), setuju

sebanyak 8 responden (21.1%) dan sangat setuju sebanyak 7 responden (18.4%). Dari jawaban responden tentang penandaan atau petunjuk yang ada harus ditaati tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.41
Tanda dan petunjuk yang ada mudah diingat dan dimengerti

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| | Ragu-ragu | 14 | 36.8 |
| | Setuju | 19 | 50.0 |
| | Sangat Setuju | 3 | 7.9 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 2 responden (5.3%), ragu-ragu sebanyak 14 responden (36.8%), setuju sebanyak 19 responden (50.0%) dan sangat setuju sebanyak 3 responden (7.9%). Dari jawaban responden tentang tanda dan petunjuk yang ada mudah diingat dan dimengerti tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.42
Dengan adanya Kawasan Dilarang Merokok mempengaruhi kebiasaan merokok di kawasan umum

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 5 | 13.2 |
| | Ragu-ragu | 8 | 21.1 |
| | Setuju | 17 | 44.7 |
| | Sangat Setuju | 8 | 21.1 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 5 responden (13.2%), ragu-ragu sebanyak 8 responden (21.1%), setuju sebanyak 17 responden (44.7%) dan sangat setuju sebanyak 8 responden (21.1%). Dari jawaban responden tentang dengan adanya

Kawasan Dilarang Merokok mempengaruhi kebiasaan merokok di kawasan umum tertinggi yaitu setuju.

4.2.3.3 Variabel Efektifitas kebijakan publik

Tabel 4.43
Pengaturan Kawasan Dilarang Merokok sebagai upaya menciptakan udara yang sehat dan bersih

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 21 | 55.3 |
| | Setuju | 14 | 36.8 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 21 responden (55.3%), setuju sebanyak 14 responden (36.8%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (5.3%). Dari jawaban responden tentang pengaturan Kawasan Dilarang Merokok sebagai upaya menciptakan udara yang sehat dan bersih tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.44
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| | Ragu-ragu | 12 | 31.6 |
| | Setuju | 22 | 57.9 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (10.5%), ragu-ragu sebanyak 12 responden (31.6%) dan

setuju sebanyak 22 responden (57.9%). Dari jawaban responden tentang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.45
Untuk udara yang sehat dan bersih diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 3 | 7.9 |
| | Ragu-ragu | 12 | 31.6 |
| | Setuju | 21 | 55.3 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 3 responden (7,9%), ragu-ragu sebanyak 12 responden (31,6), setuju sebanyak 21 responden (55,3%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (4,2%) dan setuju sebanyak 31 responden (81,6%). Dari jawaban responden tentang untuk udara yang sehat dan bersih diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.46
Rokok adalah merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat sekitar

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 11 | 28.9 |
| | Setuju | 25 | 65.8 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 11 responden (28.9%), setuju sebanyak 25 responden (65.8%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (2.6%). Dari jawaban responden tentang rokok adalah merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat sekitar tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.47
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan wajib menerapkan kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| | Ragu-ragu | 18 | 47.4 |
| | Setuju | 17 | 44.7 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 2 responden (5.3%), ragu-ragu sebanyak 18 responden (47.4%), setuju sebanyak 17 responden (44.7%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (2.6%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat atau kawasan wajib menerapkan kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.48
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 5 | 13.2 |
| | Ragu-ragu | 23 | 60.5 |
| | Setuju | 10 | 26.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 5 responden (13.2%), ragu-ragu sebanyak 23 responden (60.5%) dan setuju sebanyak 10 responden (26.3%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.49
Pimpinan dan/atau penanggung jawab telah memberikan contoh ditempat yang menjadi tanggung jawabnya di kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| | Ragu-ragu | 18 | 47.4 |
| | Setuju | 17 | 44.7 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 2 responden (5.3%), ragu-ragu sebanyak 18 responden (47.4%), setuju sebanyak 18 responden (44.7%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (2.6%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab telah memberikan contoh ditempat yang menjadi tanggung jawabnya di kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.50
Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di kawasan dilarang merokok

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| | Ragu-ragu | 18 | 47.4 |
| | Setuju | 15 | 39.5 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 4 responden (10.5%), ragu-ragu sebanyak 18 responden (47.4%), setuju sebanyak 15 responden (39.5%) dan sangat setuju sebanyak 1 responden (1.2%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok kepada masyarakat di kawasan dilarang merokok tertinggi yaitu ragu-ragu.

Tabel 4.51
Pimpinan dan/atau penanggung jawab, wajib menegur, mengingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti merokok ditempat umum

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 6 | 15.8 |
| | Setuju | 29 | 76.3 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 6 responden (15.8%), setuju sebanyak 29 responden (76.3%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (5.3%). Dari jawaban responden tentang pimpinan dan/atau penanggung jawab, wajib menegur, mengingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti merokok ditempat umum tertinggi yaitu setuju.

Tabel 4.52
Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan lingkungannya

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 15 | 39.5 |
| | Setuju | 20 | 52.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan tabel diatas didapatkan tidak setuju sebanyak 1 responden (2.6%), ragu-ragu sebanyak 15 responden (39.5%), setuju sebanyak 20 responden (52.6%) dan sangat setuju sebanyak 2 responden (5.3%). Dari jawaban responden tentang setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan lingkungannya tertinggi yaitu setuju.

Secara deskripsi statistik dari jumlah jawaban variabel partisipasi, persepsi masyarakat dan efektifitas kebijakan publik yaitu :

Tabel 4.53
Statistik Deskriptif

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Variance |
|------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Kebijakan Publik | 38 | 2.40 | 4.50 | 3.5000 | .44235 | .196 |
| Partisipasi Masyarakat | 38 | 2.17 | 4.83 | 3.5355 | .71517 | .511 |
| Persepsi Masyarakat | 38 | 2.33 | 4.50 | 3.5000 | .51132 | .261 |
| Valid N (listwise) | 38 | | | | | |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Tabel diatas juga memperlihatkan bahwa jumlah responden sebanyak 38 orang, rata-rata jawaban variable efektifitas kebijakan publik sebesar 3.5000 dengan standar deviasi 0.44235 sedangkan

partisipasi masyarakat sebesar 3.5355 dengan standar deviasi 0.71517 dan persepsi masyarakat sebesar 3.5000 dengan standar deviasi 0.51132. Jumlah minimum jawaban variable kebijakan public sebesar 2.40 dan maksimum 4.50 sedangkan partisipasi masyarakat minimum 2.17 dan maksimum sebesar 4.83 dan persepsi masyarakat minimum 2.33 dan maksimum 4.50.

4.2.4 Validitas dan Reliabilitas Data

4.2.4.1 Uji Validitas

Partisipasi Masyarakat

Tabel 4.54
Validitas Partisipasi Masyarakat

| | Hasil Validasi | p-value | Kesimpulan |
|-------------|----------------|---------|------------|
| Sukarela | .583 | .000 | Valid |
| Kemauan | .614 | .000 | Valid |
| Inisiatif | .775 | .000 | Valid |
| Monitoring | .745 | .000 | Valid |
| Perubahan | .767 | .000 | Valid |
| Pembangunan | .617 | .000 | Valid |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Setelah dilakukan analisis item pada variabel partisipasi masyarakat, maka didapatkan 6 item dinyatakan valid. Hasil tersebut didasarkan oleh perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dimana taraf signifikansi nya 5%. Dari data r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 38$ adalah sebesar 0.320.

Maka dapat diperhatikan pada tabel correlation diatas pada bagian total *Pearson Correlation (r)* bahwa tidak terdapat angka dibawah nilai 0.320, dengan demikian semua jawaban dari kuesioner yang disebar semuanya mewakili.

Persepsi Masyarakat

Tabel 4.55
Validitas Persepsi Masyarakat

| | Hasil Validasi | p-value | Kesimpulan |
|------------------------------------|----------------|---------|------------|
| dilengkapi penandaan atau petunjuk | .689 | .000 | Valid |
| Pesan harus diikuti | .782 | .000 | Valid |
| Tepat dan mudah dibaca | .716 | .000 | Valid |
| Pesan harus ditaati | .846 | .000 | Valid |
| Mengerti dan mengingat | .755 | .000 | Valid |
| Mempengaruhi kebiasaan merokok | .717 | .000 | Valid |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Setelah dilakukan analisis item pada variabel persepsi masyarakat, maka didapatkan 6 item dinyatakan valid. Hasil tersebut didasarkan oleh perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dimana taraf signifikansi nya 5%. Dari data r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 38$ adalah sebesar 0.320.

Maka dapat diperhatikan pada tabel correlation diatas pada bagian total *Pearson Correlation (r)* bahwa tidak terdapat angka dibawah nilai 0.320, dengan demikian semua jawaban dari kuesioner yang disebar semuanya mewakili.

Efektifitas kebijakan publik

Tabel 4.56
Validitas Efektifitas kebijakan publik

| | Hasil Validasi | p-value | Kesimpulan |
|---------------------|----------------|---------|------------|
| Pengaturan | .758 | .000 | Valid |
| Pertimbangan | .622 | .000 | Valid |
| Kemampuan | .813 | .000 | Valid |
| Bahaya rokok | .553 | .000 | Valid |
| Wajib menerapkan | .796 | .000 | Valid |
| Wajib memasang | .834 | .000 | Valid |
| Memberi contoh | .843 | .000 | Valid |
| Menampilkan data | .716 | .000 | Valid |
| Wajib Mengingatikan | .380 | .019 | Valid |
| Bimbingan | .488 | .002 | Valid |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Setelah dilakukan analisis item pada variabel efektifitas kebijakan publik, maka didapatkan 10 item dinyatakan valid. Hasil tersebut didasarkan oleh perbandingan nilai r hitung dengan r tabel dimana taraf signifikansi nya 5%. Dari data r tabel dengan taraf signifikansi 5% dan $N = 38$ adalah sebesar 0.320.

Maka dapat diperhatikan pada tabel correlation diatas pada bagian total *Pearson Correlation (r)* bahwa tidak terdapat angka dibawah nilai 0.320, dengan demikian semua jawaban dari kuesioner yang disebar semuanya mewakili.

4.2.4.2 Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih.

Tingkat reliabilitas dengan metode *Cronbach's Alpha (α)* diukur berdasarkan skala *alpha* 0 sampai dengan 1. Apabila skala tersebut dikelompokkan ke dalam kelas dengan range yang sama, maka melihat ukuran kemantapan dan tingkat reliabel berdasarkan nilai *alpha* dapat diinterpretasikan seperti tabel berikut :

| Angka Reliabel | Keterangan |
|---------------------------|-----------------|
| 0,00 sampai dengan 0,20 | Kurang Reliabel |
| > 0,20 sampai dengan 0,40 | Agak reliabel |
| > 0,40 sampai dengn 0,60 | Cukup Reliabel |
| > 0,60 sampai dengan 0,80 | Reliabel |
| > 0,80 sampai dengan 1,00 | Sangat Reliabel |

Variabel Partisipasi Masyarakat

Reliability Coefficients

| | |
|-----------------|----------------|
| N of Cases = 38 | N of Items = 6 |
| Alpha = .774 | |

Hasil perhitungan variabel partisipasi masyarakat dengan menggunakan SPSS 16.00 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 38 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan didapatkan *Cronbach's alpha* (α) sebesar 0.774. Dengan demikian variabel diatas adalah reliabel.

Variabel Persepsi Masyarakat

Reliability Coefficients

| | |
|-----------------|----------------|
| N of Cases = 38 | N of Items = 6 |
| Alpha = .842 | |

Hasil perhitungan variabel persepsi masyarakat dengan menggunakan SPSS 16.00 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 38 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan didapatkan *Cronbach's alpha* (α) sebesar 0.842. Dengan demikian variabel diatas adalah sangat reliabel.

Variabel Efektifitas kebijakan publik

Reliability Coefficients

| | |
|-----------------|-----------------|
| N of Cases = 38 | N of Items = 10 |
| Alpha = .875 | |

Hasil perhitungan variabel efektifitas kebijakan publik dengan menggunakan SPSS 16.00 diatas menunjukkan bahwa jumlah responden sebanyak 38 responden dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 pertanyaan dan didapatkan *Cronbach's alpha* (α) sebesar 0.875. Dengan demikian variabel diatas adalah sangat reliabel.

4.2.5 Normalitas Data

Uji statistik yang dapat di gunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (Uji K-S). Uji Kolmogorov-Smirnov di lakukan dengan membuat hipotesis:

H0 : data residual berdistribusi normal

H1 : data residual tidak berdistribusi normal

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov tampak di bawah ini :

Tabel 4.57
Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| N | | 38 | 38 | 38 |
| Normal Parameters ^a | Mean | 3.5000 | 3.5355 | 3.5000 |
| | Std. Deviation | .44235 | .71517 | .51132 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .174 | .113 | .158 |
| | Positive | .147 | .113 | .158 |
| | Negative | -.174 | -.095 | -.089 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.071 | .697 | .973 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .202 | .716 | .300 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber : SPSS 16

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan dari uji normalitas data variabel efektifitas kebijakan publik sebesar 0.202. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0.05, nilai signifikan dari uji normalitas variable kebijakan publik sebesar 0.202 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho diterima atau dengan kata lain distribusi data variabel kebijakan public merupakan data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan dari uji normalitas data variabel partisipasi masyarakat sebesar 0.716. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0.05, nilai signifikan dari uji normalitas variable partisipasi sebesar 0.716 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dengan kata lain distribusi data variabel partisipasi masyarakat merupakan data berdistribusi normal.

Berdasarkan tabel diatas tingkat signifikan dari uji normalitas data variabel persepsi masyarakat sebesar 0.300. Nilai tersebut selanjutnya dibandingkan dengan tingkat signifikan yang ditetapkan sebesar 0.05, nilai signifikan dari uji normalitas variable persepsi sebesar 0.300 lebih besar dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima atau dengan kata lain distribusi data variabel persepsi masyarakat merupakan data berdistribusi normal

4.2.6 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dideteksi pada model regresi apabila pada variabel terdapat pasangan variabel bebas yang saling berkorelasi kuat satu sama lain. Apabila pada regresi terdeteksi adanya kasus multikolinearitas, maka dapat terjadi perubahan tanda koefisien regresi dari positif pada saat diuji dengan regresi sederhana, menjadi negatif pada saat diuji dengan regresi berganda atau sebaliknya. Disamping itu, multikolinearitas dapat menyebabkan fluktuasi yang besar pada prediksi koefisien regresi dan juga dapat menyebabkan penambahan variabel independen yang tidak berpengaruh sama sekali.

Suatu regresi dikatakan terdeteksi multikolinearitas apabila nilai VIF menjauhi 1 atau tolerance menjauhi 1.

Tabel 4.58
Hasil Uji Multikolinearitas

| Model | Collinearity Statistics | |
|------------------------|-------------------------|-------|
| | Tolerance | VIF |
| 1 (Constant) | | |
| Partisipasi Masyarakat | .866 | 1.146 |
| Persepsi Masyarakat | .866 | 1.146 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16

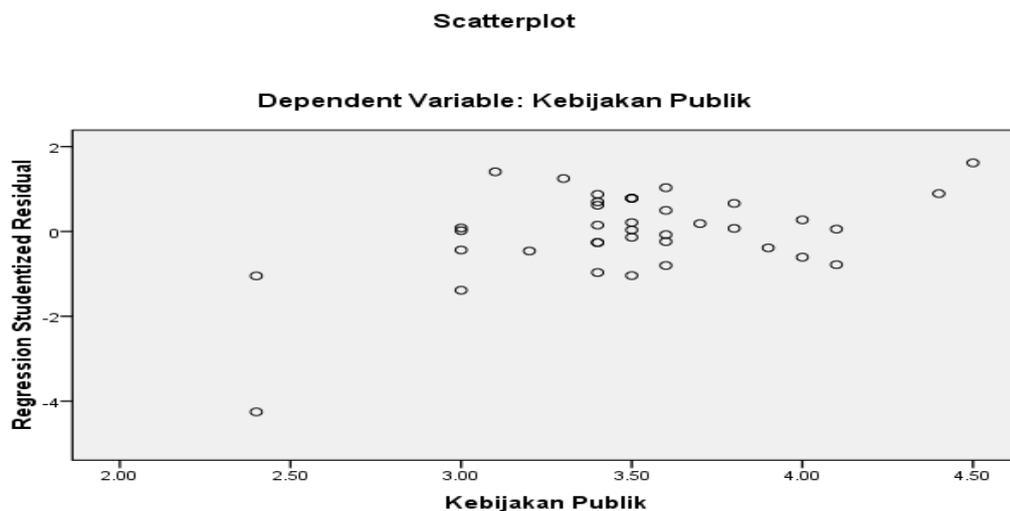
Dari hasil olahan SPSS hasil test diatas, didapat bahwa VIF dan tolerance antara variabel partisipasi masyarakat dan persepsi masyarakat pengelola keuangan memiliki nilai sama, yaitu VIF = 1.146 dan tolerance = 0.866. Baik VIF maupun tolerance mendekati 1 sehingga model regresi tidak terdeteksi multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya model regresi diatas memenuhi persyaratan asumsi klasik tentang multikolinearitas.

4.2.7 Uji Heterokedastitas

Heterokedastisitas adalah varian residual yang tidak konstan pada regresi sehingga akurasi hasil prediksi menjadi meragukan. Heterokedastisitas dapat diartikan sebagai ketidaksamaan varians variabel pada semua pengamatan, dan kesalahan yang terjadi memperlihatkan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau lebih variabel bebas sehingga kesalahan tersebut tidak random (acak).

Heterokedastisitas dapat terjadi karena dinamika lingkungan dan data variabel yang sulit diidentifikasi pada saat membuat model regresi sehingga muncul asumsi bahwa regresi sebaiknya terbebas dari heteroskedastisitas.

Berikut ini adalah hasil uji heterokedastisitas tersebut berdasarkan diagram scatter plot :



Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Berdasarkan diagram scatter plot diatas dilihat bahwa suatu regresi dikatakan terdeteksi heterokedastisitasnya apabila diagram pencar residual membentuk pola tertentu. Tampak pada diagram diatas diagram pencar, bahwa residual tidak membentuk suatu pola tertentu, sehingga dapat dikatakan bahwa regresi terbebas dari kasus heterokedastisitas.

4.2.8 Pengujian Hipotesis

Dari hasil olah data uji regresi sederhana ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

| Correlations | | | | |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
| Pearson Correlation | Kebijakan Publik | 1.000 | .782 | .847 |
| | Partisipasi Masyarakat | .782 | 1.000 | .731 |
| | Persepsi Masyarakat | .847 | .731 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kebijakan Publik | . | .000 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .000 | . | .000 |
| | Persepsi Masyarakat | .000 | .000 | . |
| N | Kebijakan Publik | 38 | 38 | 38 |
| | Partisipasi Masyarakat | 38 | 38 | 38 |
| | Persepsi Masyarakat | 38 | 38 | 38 |

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Dari hasil korelasi diatas tampak bahwa korelasi antara partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik = 0.782 dengan tingkat signifikansi = 0.000 maka keadaan ini menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikans.

Korelasi antara persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik = 0.847 dengan tingkat signifikansi 0.000 maka keadaan ini menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikans.

1. Pengaruh korelasi partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

Mengetahui nilai t hitung dari pengaruh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah :

t hitung = 2.981, dimana

r = hasil korelasi partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

n = jumlah responden

Dapat diketahui t hitung = 2.981 (dari perhitungan t hitung coefficients diatas) sedangkan pada t tabel = 2.021.

Jadi t hitung 2.981 > t tabel 2.021 dengan demikian H_0 : ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara korelasi partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik.

2. Pengaruh korelasi persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

Mengetahui nilai t hitung dari pengaruh persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah :

t hitung = 5.037, dimana

r = hasil korelasi persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik

n = jumlah responden

Dapat diketahui t hitung = 5.037 (dari perhitungan t hitung coefficients diatas) sedangkan pada t tabel = 2.021.

Jadi t hitung 5.037 > t tabel 2.021 dengan demikian H_0 : ditolak.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat

antara korelasi persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik.

3. Pengaruh korelasi partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap kinerja efektifitas kebijakan publik

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .880 ^a | .775 | .762 | .21572 | 1.884 |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Pada bagian ini menunjukkan pasangan korelasi kedua variabel partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah sebesar 0.880. Sedangkan R^2 (indek determinasi) adalah 0.775. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan dari hubungan secara bersama-sama (multi regression) antara partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah sebesar 88.0%. Selebihnya sebesar 22.0% dipengaruhi oleh faktor lain.

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 5.611 | 2 | 2.806 | 60.292 | .000 ^a |
| | Residual | 1.629 | 35 | .047 | | |
| | Total | 7.240 | 37 | | | |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Uji ANOVA (*analysis of variance*) untuk menguji ada tidaknya pengaruh kedua variable independent terhadap variable dependent (multi regresion). Dapat diperhatikan bahwa F pada tabel anova diatas adalah 60.292. Sedang F tabel (α 0,05), (numerator = 2 dan denominator = 38) adalah 2.220
Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ (α 0,05).

Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, dapat ditarik kesimpulan bahwa kedua variabel partisipasi dan persepsi masyarakat berpengaruh terhadap efektifitas kebijakan publik.

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .943 | .245 | | 3.846 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .217 | .073 | .350 | 2.981 | .005 |
| | Persepsi Masyarakat | .512 | .102 | .592 | 5.037 | .000 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Sumber : Hasil Olahan SPSS 16.00

Dari tabel diatas dapat dibuat model persamaannya yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + c_2X_2$$

$$Y = 0.943 + 0.217 X_1 + 0.512 X_2$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa efektifitas kebijakan publik akan berhasil apabila partisipasi masyarakat ditingkatkan, dan apabila persepsi masyarakat ditingkatkan maka efektifitas kebijakan publik akan meningkat pula.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pembahasan Responden yang Merokok

Dari hasil penelitian didapatkan dapat dijelaskan bahwa :

1. Kuat atau lemahnya pengaruh antar variabel partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik ditunjukkan sebesar 0.402 yaitu sekitar 40.2% disumbangkan oleh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik bagi para perokok sedangkan sisanya 59.8% dipengaruhi oleh faktor lain.
2. Kuat atau lemahnya pengaruh antar variabel persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik bagi para perokok ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0.406 artinya sekitar 40.6% persepsi masyarakat mempengaruhi efektifitas kebijakan

publik para perokok sedangkan sisanya 59.4% dipengaruhi oleh faktor lain.

3. Kuat atau lemahnya pengaruh partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0.518 atau 51.8%. Koefisien korelasi sebesar ini menunjukkan besarnya sumbangan variabel partisipasi dan persepsi masyarakat secara bersama-sama terhadap efektifitas kebijakan publik. Sesuai dengan hasil pengujian terhadap semua hipotesa, ternyata hipotesis dapat terjawab. Hal ini berarti bahwa efektifitas kebijakan publik dipengaruhi oleh partisipasi dan persepsi masyarakat, baik secara simultan maupun secara bersama-sama.
4. Hasil dari penelitian ini terbukti, terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi dan persepsi masyarakat dengan efektifitas kebijakan publik sebesar 0.518. Koefisien korelasi sebesar 0.518 dikategorikan kuat dengan besar sumbangan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah 51.8%. R^2 sebesar 0.268 menunjukkan pengertian bahwa sebesar 26.8% sumbangan pengaruh x_1 (partisipasi) dan x_2 (persepsi) terhadap y (efektifitas kebijakan publik), sedang sisanya 73.2% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan model regresi multiple $Y = 1.704 + 0.209 X_1 + 0.323 X_2$.

4.3.2 Pembahasan Responden yang Tidak Merokok

Dari hasil penelitian didapatkan dapat dijelaskan bahwa :

1. Kuat atau lemahnya pengaruh antar variabel partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik ditunjukkan sebesar 0.782 yaitu sekitar 78.2% disumbangkan oleh partisipasi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik bagi yang tidak merokok sedangkan sisanya 21.8% dipengaruhi oleh faktor lain.

2. Kuat atau lemahnya pengaruh antar variabel persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0.847 yaitu sekitar 84.7% disumbangkan oleh persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik bagi yang tidak merokok sedangkan sisanya 15.3% dipengaruhi oleh faktor lain.
3. Kuat atau lemahnya pengaruh partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0.880 atau 88.0%. Koefisien korelasi sebesar ini menunjukkan besarnya sumbangan variabel partisipasi dan persepsi masyarakat secara bersama-sama terhadap efektifitas kebijakan publik. Sesuai dengan hasil pengujian terhadap semua hipotesa, ternyata hipotesis dapat terjawab. Hal ini berarti bahwa efektifitas kebijakan publik dipengaruhi oleh partisipasi dan persepsi masyarakat, baik secara simultan maupun secara bersama-sama.
4. Hasil dari penelitian ini terbukti, terdapat hubungan yang signifikan antara partisipasi dan persepsi masyarakat dengan efektifitas kebijakan publik sebesar 0.880. Koefisien korelasi sebesar 0.880 dikategorikan kuat dengan besar sumbangan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik adalah 88.0%. R^2 sebesar 0.775 menunjukkan pengertian bahwa sebesar 77.5% sumbangan pengaruh x_1 (partisipasi) dan x_2 (persepsi) terhadap y (efektifitas kebijakan publik), sedang sisanya 32.5% dipengaruhi oleh faktor lain. Dengan model regresi multiple $Y = 0.943 + 0.217 X_1 + 0.512 X_2$.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan terhadap para pengguna/pengunjung di kawasan umum yang merupakan tempat kawasan dilarang merokok. Berdasarkan pembahasan dari hasil pengujian terhadap semua hipotesis, ternyata hipotesis dapat terjawab dan ditemukan pembuktian hipotesis dari penelitian ini bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik.

Hal ini berarti bahwa baik para perokok dan tidak merokok pada efektifitas kebijakan publik dipengaruhi oleh partisipasi dan persepsi masyarakat, baik secara partial maupun secara bersama-sama. Koefisien korelasi dikategorikan kuat dengan besar sumbangan partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik. Namun pada pengaruh partisipasi dan persepsi terhadap efektifitas kebijakan publik pada para perokok lebih rendah daripada yang tidak merokok. Dengan demikian untuk meningkatkan efektifitas kebijakan publik Pergub No. 75 Tahun 2005 diperlukan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi dan persepsi masyarakat.

Untuk memiliki partisipasi dan persepsi masyarakat yang tinggi, diperlukan adanya upaya-upaya pengembangan baik secara internal maupun eksternal yang dapat memberikan nilai tambah bagi para pengguna/pengunjung kawasan dilarang merokok yang bersangkutan, sehingga dapat tercapai tujuan Pergub No. 75 Tahun 2005 dengan baik tanpa mengalami suatu kesulitan yang berarti. Dengan meningkatnya partisipasi dan persepsi masyarakat pegawai yang bersangkutan, maka dengan sendirinya akan meningkatkan persepsi masyarakat yang pada akhirnya akan mempunyai dampak meningkatnya efektifitas kebijakan publik seperti yang diharapkan.

Dari persamaan dapat diartikan bahwa efektifitas kebijakan publik akan berhasil apabila partisipasi masyarakat ditingkatkan, dan apabila persepsi masyarakat ditingkatkan maka efektifitas kebijakan publik akan meningkat pula.

5.2. Saran

1. Persepsi masyarakat pada kategori tinggi hal ini perlu dipertahankan dan bahkan perlu ditingkatkan, maka disarankan untuk memberikan pengembangan persepsi masyarakat melalui pemasangan tanda dan tulisan KAWASAN DILARANG MEROKOK yang jelas dan mudah diingat juga melalui iklan layanan masyarakat dimedia elektronik maupun cetak.
2. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa persepsi lebih tinggi dari partisipasi maka diharapkan pemerintah agar mengalokasikan dana lebih besar untuk kegiatan peningkatkan persepsi masyarakat dibandingkan dengan partisipasi masyarakat.
3. Pemerintah daerah agar dapat memberikan pelayanan penyuluhan terhadap swasta dan instansi pemerintahan mengenai Pergub No. 75 Tahun 2005 dan sanksinya.
4. Untuk meningkatkan partisipasi dan persepsi masyarakat pada tempat perbelanjaan, kantor swasta, instansi pemerintah, terminal perlu dipertahankan adanya ruangan bebas merokok agar tidak merugikan yang tidak merokok dalam hal ini perokok pasif sedangkan pada sarana ibadah dan sarana pendidikan juga sudah sesuai tidak sediakan ruangan bebas merokok karena area tersebut dapat memberikan pendidikan secara langsung agar masyarakat tidak merokok di kawasan umum. Dan bagi yang melanggar agar dikenakan sanksi yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn William N., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Edisi Kedua, 1999
- Fajar Marhaeni. *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktik*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2008.
- Godam64, *Meningkatkan Pendapatan Daerah Dengan Perda Larangan Merokok Di Tempat Umum*
- Hair, F. Joseph, Ralph E. Anderson, Ronald L. Tatman, William C. Black, *Fifth Edition, Multivariate Data Analysis*, Prentice Hall, New Jersey, 1998.
- Husein Umar. *Metode Riset Ilmu Administrasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Koentjaraningrat, *Migrasi, Transmigrasi dan Urbanisasi, Masalah-Masalah Pembangunan*, Bunga Rampai Antropologi Terapan, LP3ES, Jakarta, 1982.
- Moeljarto. T, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana, 1987.
- Mikhelsen, B. *Metode Penelitian Partisipasi dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999.
- AR. Mustopadidjaja, *Manajemen Proses Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*, Lembaga Administrasi Indonesia, Jakarta, 2003.
- Tjokroamidjojo. Bintoro, *Perencanaan Pembangunan dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- TPGIMAGES, Survei: 99 Persen Setuju Larangan Merokok di Tempat Umum.
- Siagian, Sondang. P, *Administrasi Pembangunan, Jakarta, Gunung Agung*, 1985.
- Sinambela Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik : Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Bumi Aksara, 2006
- Suara Merdeka, *Perda Merokok Di Jakarta : Yang Merokok Didenda 40 Juta*, Kamis 02 Februari 2006.

Suara Merdeka, [Lumpuh, Larangan Merokok di Tempat Umum](#), Kamis 31 Mei 2007.

Suwanto, *Beberapa Upaya untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*, Analisa, 1983

Zainal Abidin Said, *Kebijakan Publik*, Edisi Revisi, Yayasan Pancur Siwah, 2002.

KUESIONER

Dengan hormat,

Dalam rangka kegiatan Penelitian yang dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok, maka saya mohon dengan hormat kepada bapak/ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan kuesioner yang telah disediakan.

Jawaban bapak/Ibu diharapkan objektif artinya diisi apa adanya, bapak/ibu tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan jawaban yang sejujurnya. Semua jawaban yang diberikan oleh bapak/ibu adalah benar, dan jawaban yang diminta adalah sesuai dengan kondisi yang dirasakan bapak/ibu. Data dan identitas bapak/ibu dijamin kerahasiaannya

Keterangan / Informasi yang Bapak/Ibu berikan dalam kuisisioner ini sangat menentukan keberhasilan penelitian ini. Dengan demikian, saya harapkan Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Kesediaan Bapak/Ibu memberikan informasi pada kuesioner ini merupakan bantuan yang sangat berharga, atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap efektifitas kebijakan publik Peraturan Gubernur No.75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

1. Untuk maksud tersebut dimohon kesediaan Bapak/Ibu memberi jawaban dengan cara membubuhkan tanda silang (X) pada kolom yang tersedia, pada daftar pertanyaan :

- I. Kuesioner Partisipasi Masyarakat
- II. Kuesioner Persepsi Masyarakat
- III. Kuesioner Efektifitas kebijakan publik

Terdapat lima pilihan jawaban :

- 5 = *Sangat Tinggi* atau *Sangat Setuju*
- 4 = *Tinggi* atau *Setuju*
- 3 = *Cukup Tinggi* atau *Ragu-Ragu*
- 2 = *Rendah* atau *Tidak Setuju*
- 1 = *Rendah* atau *Sangat Tidak Setuju*

2. Karakteristik responden :

a. Nomor Responden :

a. Jenis kelamin : Laki-laki Perempuan

b. Usia : tahun

c. Pendidikan :

d. Merokok / Tidak Merokok

Partisipasi Masyarakat

| Pertanyaan | STS | TS | RR | S | SS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|----|
| 1. Warga masyarakat memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya. | | | | | |
| 2. Warga masyarakat memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok. | | | | | |
| 3. Perangkat daerah menyelenggarakan Kawasan Dilarang Merokok di setiap tempat yang diterapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok. | | | | | |
| 4. Masing-masing perangkat daerah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok. | | | | | |
| 5. Memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok. | | | | | |
| 6. Perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan penyuluhan pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok. | | | | | |

Persepsi Masyarakat

| Pertanyaan | STS | TS | RR | S | SS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|----|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok wajib dilengkapi dengan penandaan atau petunjuk. 2. Tulisan yang ditulis dapat dan mudah dibaca. 3. Gambar, tanda dan simbol yang mudah dilihat serta dimengerti. 4. Penandaan atau petunjuk yang ada harus ditaati. 5. Tanda dan petunjuk yang ada mudah diingat dan dimengerti. 6. Dengan adanya Kawasan Dilarang Merokok mempengaruhi kebiasaan merokok di kawasan umum | | | | | |

Efektifitas kebijakan publik

| Pertanyaan | STS | TS | RR | S | SS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----|---|----|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Kawasan Dilarang Merokok. 2. Anggaran pelaksanaan kebijakan mendukung efektifitas kebijakan. 3. Penyediaan dan penandaan tempat khusus untuk perokok. 4. Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat dapat menampilkan data dan informasi bahaya rokok dan tempat kawasan dilarang merokok kepada masyarakat. 5. Adanya dukungan dari DPRD mengenai kebijakan kawasan dilarang merokok di tempat umum. 6. Pimpinan atau penanggung jawab tempat wajib memasang larangan merokok di tempat yang dinyatakan kawasan dilarang merokok. 7. Penerapan kawasan dilarang merokok merupakan keputusan politik atau interaksi dari berbagai instansi atau perorangan atas dasar konstitusi. 8. Pimpinan dan/atau penanggung jawab, wajib menegur, mengingatkan dan/atau mengambil tindakan dikenakan sanksi hukuman selama 6 bulan atau denda Rp. 50.000.000,- apabila terbukti merokok ditempat umum. 9. Pengaturan Kawasan Dilarang Merokok sebagai upaya menciptakan udara yang sehat dan bersih. 10. Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan lingkungannya | | | | | |

Frequencies Partisipasi Merokok

part1

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 36 | 43.9 |
| Setuju | 40 | 48.8 |
| Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| Total | 82 | 100.0 |

part2

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 35 | 42.7 |
| Setuju | 36 | 43.9 |
| Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| Total | 82 | 100.0 |

part3

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 5 | 6.1 |
| Ragu-ragu | 31 | 37.8 |
| Setuju | 38 | 46.3 |
| Sangat Setuju | 8 | 9.8 |
| Total | 82 | 100.0 |

part4

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 2 | 2.4 |
| Ragu-ragu | 34 | 41.5 |
| Setuju | 41 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 5 | 6.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

part5

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 27 | 32.9 |
| Setuju | 43 | 52.4 |
| Sangat Setuju | 8 | 9.8 |
| Total | 82 | 100.0 |

part6

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 3 | 3.7 |
| Ragu-ragu | 22 | 26.8 |
| Setuju | 51 | 62.2 |
| Sangat Setuju | 6 | 7.3 |
| Total | 82 | 100.0 |

Correlations Partisipasi Merokok

Correlations

| | | part1 | part2 | part3 | part4 | part5 | part6 | Mean |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| part1 | Pearson Correlation | 1 | .474** | .236* | .154 | .329** | .142 | .642** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .033 | .167 | .003 | .203 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part2 | Pearson Correlation | .474** | 1 | .057 | .120 | .217 | -.017 | .507** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .610 | .284 | .050 | .877 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part3 | Pearson Correlation | .236* | .057 | 1 | .095 | .413** | .181 | .600** |
| | Sig. (2-tailed) | .033 | .610 | | .397 | .000 | .104 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part4 | Pearson Correlation | .154 | .120 | .095 | 1 | .163 | .240* | .487** |
| | Sig. (2-tailed) | .167 | .284 | .397 | | .144 | .030 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part5 | Pearson Correlation | .329** | .217 | .413** | .163 | 1 | .231* | .700** |
| | Sig. (2-tailed) | .003 | .050 | .000 | .144 | | .037 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part6 | Pearson Correlation | .142 | -.017 | .181 | .240* | .231* | 1 | .500** |
| | Sig. (2-tailed) | .203 | .877 | .104 | .030 | .037 | | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Mean | Pearson Correlation | .642** | .507** | .600** | .487** | .700** | .500** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Partisipasi Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 82 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 82 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .603 | 6 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| part1 | 3.49 | .633 | 82 |
| part2 | 3.56 | .722 | 82 |
| part3 | 3.60 | .751 | 82 |
| part4 | 3.60 | .645 | 82 |
| part5 | 3.67 | .721 | 82 |
| part6 | 3.73 | .649 | 82 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| part1 | 18.16 | 4.110 | .468 | .507 |
| part2 | 18.09 | 4.375 | .270 | .586 |
| part3 | 18.05 | 4.146 | .328 | .563 |
| part4 | 18.05 | 4.615 | .246 | .593 |
| part5 | 17.98 | 3.851 | .474 | .496 |
| part6 | 17.91 | 4.598 | .250 | .591 |

Partisipasi Masyarakat

| No. | Pertanyaan | | | | | | Mean |
|-----|------------|------|------|------|------|------|------|
| | Par1 | Par2 | Par3 | Par4 | Par5 | Par6 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3,00 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,00 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,00 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4,00 |
| 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4,33 |
| 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,50 |
| 9 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,17 |
| 10 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,50 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,67 |
| 12 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,17 |
| 13 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,67 |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4,83 |
| 15 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,33 |
| 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,17 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3,17 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3,17 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3,17 |
| 20 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,00 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,50 |
| 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,33 |
| 23 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,00 |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2,33 |
| 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,33 |
| 26 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,67 |
| 27 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,50 |
| 28 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,83 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 30 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,83 |
| 31 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,67 |
| 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,33 |
| 34 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3,17 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,33 |
| 36 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,67 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,50 |
| 38 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,50 |
| 39 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,83 |
| 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,17 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,50 |
| 42 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,83 |
| 43 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4,00 |
| 44 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4,17 |
| 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,67 |
| 46 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3,83 |
| 47 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,33 |
| 48 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3,00 |
| 49 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,83 |
| 50 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 51 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,17 |
| 52 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3,50 |
| 53 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3,67 |
| 54 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3,83 |
| 55 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3,83 |
| 56 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,83 |
| 57 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,33 |
| 58 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,33 |
| 59 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,33 |
| 60 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3,83 |
| 61 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4,33 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|------|
| 62 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,50 |
| 63 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,50 |
| 64 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,33 |
| 65 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,50 |
| 66 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2,67 |
| 67 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| 68 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3,50 |
| 69 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,33 |
| 70 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,33 |
| 71 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,33 |
| 72 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,50 |
| 73 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3,83 |
| 74 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,50 |
| 75 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,83 |
| 76 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4,33 |
| 77 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,67 |
| 78 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,50 |
| 79 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,17 |
| 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2,50 |
| 81 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,33 |
| 82 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3,17 |
| 83 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3,33 |
| 84 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3,50 |
| 85 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,50 |
| 86 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,83 |
| 87 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4,33 |
| 88 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,67 |
| 89 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4,17 |
| 90 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4,50 |
| 91 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4,00 |
| 92 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2,83 |
| 93 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3,50 |
| 94 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 95 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 96 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3,50 |
| 97 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3,17 |
| 98 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3,00 |
| 99 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,50 |
| 100 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,67 |
| 101 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,83 |
| 102 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3,67 |
| 103 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3,83 |
| 104 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 105 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3,83 |
| 106 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,67 |
| 107 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,83 |
| 108 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |
| 109 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,50 |
| 110 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,50 |
| 111 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,50 |
| 112 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,50 |
| 113 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| 114 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,33 |
| 115 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3,67 |
| 116 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3,50 |
| 117 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,17 |
| 118 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3,50 |
| 119 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4,33 |
| 120 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,67 |

Frequencies Partisipasi Merokok

part1

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 36 | 43.9 |
| Setuju | 40 | 48.8 |
| Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| Total | 82 | 100.0 |

part2

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 35 | 42.7 |
| Setuju | 36 | 43.9 |
| Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| Total | 82 | 100.0 |

part3

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 5 | 6.1 |
| Ragu-ragu | 31 | 37.8 |
| Setuju | 38 | 46.3 |
| Sangat Setuju | 8 | 9.8 |
| Total | 82 | 100.0 |

part4

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 2 | 2.4 |
| Ragu-ragu | 34 | 41.5 |
| Setuju | 41 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 5 | 6.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

part5

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 27 | 32.9 |
| Setuju | 43 | 52.4 |
| Sangat Setuju | 8 | 9.8 |
| Total | 82 | 100.0 |

part6

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 3 | 3.7 |
| Ragu-ragu | 22 | 26.8 |
| Setuju | 51 | 62.2 |
| Sangat Setuju | 6 | 7.3 |
| Total | 82 | 100.0 |

Correlations Partisipasi Merokok

Correlations

| | | part1 | part2 | part3 | part4 | part5 | part6 | Mean |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| part1 | Pearson Correlation | 1 | .474** | .236* | .154 | .329** | .142 | .642** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .033 | .167 | .003 | .203 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part2 | Pearson Correlation | .474** | 1 | .057 | .120 | .217 | -.017 | .507** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .610 | .284 | .050 | .877 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part3 | Pearson Correlation | .236* | .057 | 1 | .095 | .413** | .181 | .600** |
| | Sig. (2-tailed) | .033 | .610 | | .397 | .000 | .104 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part4 | Pearson Correlation | .154 | .120 | .095 | 1 | .163 | .240* | .487** |
| | Sig. (2-tailed) | .167 | .284 | .397 | | .144 | .030 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part5 | Pearson Correlation | .329** | .217 | .413** | .163 | 1 | .231* | .700** |
| | Sig. (2-tailed) | .003 | .050 | .000 | .144 | | .037 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| part6 | Pearson Correlation | .142 | -.017 | .181 | .240* | .231* | 1 | .500** |
| | Sig. (2-tailed) | .203 | .877 | .104 | .030 | .037 | | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Mean | Pearson Correlation | .642** | .507** | .600** | .487** | .700** | .500** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Partisipasi Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 82 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 82 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .603 | 6 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| part1 | 3.49 | .633 | 82 |
| part2 | 3.56 | .722 | 82 |
| part3 | 3.60 | .751 | 82 |
| part4 | 3.60 | .645 | 82 |
| part5 | 3.67 | .721 | 82 |
| part6 | 3.73 | .649 | 82 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| part1 | 18.16 | 4.110 | .468 | .507 |
| part2 | 18.09 | 4.375 | .270 | .586 |
| part3 | 18.05 | 4.146 | .328 | .563 |
| part4 | 18.05 | 4.615 | .246 | .593 |
| part5 | 17.98 | 3.851 | .474 | .496 |
| part6 | 17.91 | 4.598 | .250 | .591 |

Frequencies Persepsi Merokok

pers1

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 11 | 13.4 |
| Ragu-ragu | 26 | 31.7 |
| Setuju | 31 | 37.8 |
| Sangat Setuju | 14 | 17.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

pers2

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 23 | 28.0 |
| Setuju | 40 | 48.8 |
| Sangat Setuju | 15 | 18.3 |
| Total | 82 | 100.0 |

pers3

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 29 | 35.4 |
| Setuju | 31 | 37.8 |
| Sangat Setuju | 18 | 22.0 |
| Total | 82 | 100.0 |

pers4

| | Frequency | Percent |
|---------------------------|-----------|---------|
| Valid Sangat Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| Tidak Setuju | 5 | 6.1 |
| Ragu-ragu | 24 | 29.3 |
| Setuju | 41 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 11 | 13.4 |
| Total | 82 | 100.0 |

pers5

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 3 | 3.7 |
| Ragu-ragu | 36 | 43.9 |
| Setuju | 29 | 35.4 |
| Sangat Setuju | 14 | 17.1 |
| Total | 82 | 100.0 |

pers6

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 12.2 |
| Ragu-ragu | 31 | 37.8 |
| Setuju | 30 | 36.6 |
| Sangat Setuju | 11 | 13.4 |
| Total | 82 | 100.0 |

Correlations Persepsi Merokok

Correlations

| | | pers1 | pers2 | pers3 | pers4 | pers5 | pers6 | Mean |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| pers1 | Pearson Correlation | 1 | .308** | .330** | .196 | .419** | .506** | .720** |
| | Sig. (2-tailed) | | .005 | .002 | .078 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| pers2 | Pearson Correlation | .308** | 1 | .079 | .224* | .204 | .376** | .548** |
| | Sig. (2-tailed) | .005 | | .483 | .043 | .066 | .001 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| pers3 | Pearson Correlation | .330** | .079 | 1 | .262* | .388** | .508** | .659** |
| | Sig. (2-tailed) | .002 | .483 | | .017 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| pers4 | Pearson Correlation | .196 | .224* | .262* | 1 | .187 | .293** | .547** |
| | Sig. (2-tailed) | .078 | .043 | .017 | | .092 | .007 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| pers5 | Pearson Correlation | .419** | .204 | .388** | .187 | 1 | .373** | .651** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .066 | .000 | .092 | | .001 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| pers6 | Pearson Correlation | .506** | .376** | .508** | .293** | .373** | 1 | .787** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .001 | .000 | .007 | .001 | | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Mean | Pearson Correlation | .720** | .548** | .659** | .547** | .651** | .787** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Persepsi Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 82 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 82 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .733 | 6 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| pers1 | 3.59 | .929 | 82 |
| pers2 | 3.80 | .793 | 82 |
| pers3 | 3.77 | .851 | 82 |
| pers4 | 3.68 | .830 | 82 |
| pers5 | 3.66 | .805 | 82 |
| pers6 | 3.51 | .878 | 82 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| pers1 | 18.43 | 7.507 | .536 | .674 |
| pers2 | 18.21 | 8.833 | .348 | .727 |
| pers3 | 18.24 | 8.088 | .473 | .694 |
| pers4 | 18.33 | 8.767 | .335 | .732 |
| pers5 | 18.35 | 8.256 | .475 | .694 |
| pers6 | 18.50 | 7.265 | .647 | .639 |

Frequencies Kebijakan Merokok

keb1

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 9 | 11.0 |
| Ragu-ragu | 20 | 24.4 |
| Setuju | 46 | 56.1 |
| Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| Total | 82 | 100.0 |

keb2

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 8 | 9.8 |
| Ragu-ragu | 28 | 34.1 |
| Setuju | 44 | 53.7 |
| Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| Total | 82 | 100.0 |

keb3

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| Ragu-ragu | 23 | 28.0 |
| Setuju | 58 | 70.7 |
| Total | 82 | 100.0 |

keb4

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| Ragu-ragu | 25 | 30.5 |
| Setuju | 52 | 63.4 |
| Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| Total | 82 | 100.0 |

keb5

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 8.5 |
| Ragu-ragu | 16 | 19.5 |
| Setuju | 52 | 63.4 |
| Sangat Setuju | 7 | 8.5 |
| Total | 82 | 100.0 |

keb6

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| | Tidak Setuju | 9 | 11.0 |
| | Ragu-ragu | 21 | 25.6 |
| | Setuju | 49 | 59.8 |
| | Sangat Setuju | 2 | 2.4 |
| | Total | 82 | 100.0 |

keb7

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------------|-----------|---------|
| Valid | Sangat Tidak Setuju | 1 | 1.2 |
| | Tidak Setuju | 8 | 9.8 |
| | Ragu-ragu | 32 | 39.0 |
| | Setuju | 40 | 48.8 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

keb8

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 4.9 |
| | Ragu-ragu | 14 | 17.1 |
| | Setuju | 63 | 76.8 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

keb9

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 2.4 |
| | Ragu-ragu | 21 | 25.6 |
| | Setuju | 58 | 70.7 |
| | Sangat Setuju | 1 | 1.2 |
| | Total | 82 | 100.0 |

keb10

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Ragu-ragu | 25 | 30.5 |
| | Setuju | 52 | 63.4 |
| | Sangat Setuju | 5 | 6.1 |

keb10

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Ragu-ragu | 25 | 30.5 |
| | Setuju | 52 | 63.4 |
| | Sangat Setuju | 5 | 6.1 |
| | Total | 82 | 100.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| keb8 | Pearson Correlation | .084 | .225* | .117 | .029 | .240* | .021 | .066 | 1 | .241* | .192 | .377** |
| | Sig. (2-tailed) | .451 | .042 | .297 | .794 | .030 | .848 | .557 | | .029 | .084 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| keb9 | Pearson Correlation | -.002 | .187 | .127 | .293** | .227* | .398** | .359** | .241* | 1 | .006 | .494** |
| | Sig. (2-tailed) | .985 | .092 | .255 | .008 | .040 | .000 | .001 | .029 | | .957 | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| keb10 | Pearson Correlation | .402** | .275* | .041 | .301** | .340** | .036 | .145 | .192 | .006 | 1 | .502** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .013 | .715 | .006 | .002 | .751 | .193 | .084 | .957 | | .000 |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Mean | Pearson Correlation | .562** | .586** | .051 | .681** | .749** | .581** | .688** | .377** | .494** | .502** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .649 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Kebijakan Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 82 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 82 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .735 | 10 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| keb1 | 3.62 | .796 | 82 |
| keb2 | 3.49 | .707 | 82 |
| keb3 | 3.70 | .489 | 82 |
| keb4 | 3.61 | .604 | 82 |
| keb5 | 3.72 | .742 | 82 |
| keb6 | 3.51 | .774 | 82 |
| keb7 | 3.39 | .733 | 82 |
| keb8 | 3.74 | .562 | 82 |
| keb9 | 3.71 | .533 | 82 |
| keb10 | 3.76 | .557 | 82 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| keb1 | 32.62 | 10.189 | .390 | .717 |
| keb2 | 32.76 | 10.360 | .427 | .709 |
| keb3 | 32.55 | 12.745 | .501 | .764 |
| keb4 | 32.63 | 10.235 | .571 | .689 |
| keb5 | 32.52 | 9.388 | .631 | .672 |
| keb6 | 32.73 | 10.174 | .412 | .712 |
| keb7 | 32.85 | 9.731 | .554 | .686 |
| keb8 | 32.50 | 11.611 | .229 | .736 |
| keb9 | 32.54 | 11.190 | .373 | .718 |
| keb10 | 32.49 | 11.142 | .364 | .719 |

Frequencies Partisipasi Tidak Merokok

part1

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| Ragu-ragu | 13 | 34.2 |
| Setuju | 21 | 55.3 |
| Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| Total | 38 | 100.0 |

part2

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| Ragu-ragu | 17 | 44.7 |
| Setuju | 16 | 42.1 |
| Sangat Setuju | 4 | 10.5 |
| Total | 38 | 100.0 |

part3

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| Ragu-ragu | 22 | 57.9 |
| Setuju | 10 | 26.3 |
| Sangat Setuju | 5 | 13.2 |
| Total | 38 | 100.0 |

part4

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 6 | 15.8 |
| Ragu-ragu | 15 | 39.5 |
| Setuju | 13 | 34.2 |
| Sangat Setuju | 4 | 10.5 |
| Total | 38 | 100.0 |

part5

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| Ragu-ragu | 23 | 60.5 |
| Setuju | 10 | 26.3 |
| Sangat Setuju | 4 | 10.5 |
| Total | 38 | 100.0 |

part6

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| Ragu-ragu | 13 | 34.2 |
| Setuju | 21 | 55.3 |
| Total | 38 | 100.0 |

Correlations Partisipasi Tidak Merokok

Correlations

| | | part1 | part2 | part3 | part4 | part5 | part6 | Mean |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| part1 | Pearson Correlation | 1 | .226 | .391* | .176 | .424** | .273 | .583** |
| | Sig. (2-tailed) | | .173 | .015 | .291 | .008 | .097 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| part2 | Pearson Correlation | .226 | 1 | .370* | .379* | .401* | .149 | .614** |
| | Sig. (2-tailed) | .173 | | .022 | .019 | .013 | .373 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| part3 | Pearson Correlation | .391* | .370* | 1 | .460** | .661** | .284 | .775** |
| | Sig. (2-tailed) | .015 | .022 | | .004 | .000 | .084 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| part4 | Pearson Correlation | .176 | .379* | .460** | 1 | .391* | .546** | .745** |
| | Sig. (2-tailed) | .291 | .019 | .004 | | .015 | .000 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| part5 | Pearson Correlation | .424** | .401* | .661** | .391* | 1 | .294 | .767** |
| | Sig. (2-tailed) | .008 | .013 | .000 | .015 | | .073 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| part6 | Pearson Correlation | .273 | .149 | .284 | .546** | .294 | 1 | .617** |
| | Sig. (2-tailed) | .097 | .373 | .084 | .000 | .073 | | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mean | Pearson Correlation | .583** | .614** | .775** | .745** | .767** | .617** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Partisipasi Tidak Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 38 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 38 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .774 | 6 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| part1 | 3.61 | .679 | 38 |
| part2 | 3.61 | .718 | 38 |
| part3 | 3.50 | .762 | 38 |
| part4 | 3.39 | .887 | 38 |
| part5 | 3.45 | .724 | 38 |
| part6 | 3.45 | .686 | 38 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| part1 | 17.39 | 7.435 | .407 | .766 |
| part2 | 17.39 | 7.218 | .433 | .761 |
| part3 | 17.50 | 6.365 | .639 | .708 |
| part4 | 17.61 | 6.137 | .565 | .730 |
| part5 | 17.55 | 6.524 | .637 | .711 |
| part6 | 17.55 | 7.281 | .447 | .758 |

Frequencies Persepsi Tidak Merokok

pers1

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| Ragu-ragu | 16 | 42.1 |
| Setuju | 11 | 28.9 |
| Sangat Setuju | 7 | 18.4 |
| Total | 38 | 100.0 |

pers2

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 18.4 |
| Ragu-ragu | 11 | 28.9 |
| Setuju | 13 | 34.2 |
| Sangat Setuju | 7 | 18.4 |
| Total | 38 | 100.0 |

pers3

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 7 | 18.4 |
| Ragu-ragu | 14 | 36.8 |
| Setuju | 9 | 23.7 |
| Sangat Setuju | 8 | 21.1 |
| Total | 38 | 100.0 |

pers4

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 10 | 26.3 |
| Ragu-ragu | 13 | 34.2 |
| Setuju | 8 | 21.1 |
| Sangat Setuju | 7 | 18.4 |
| Total | 38 | 100.0 |

pers5

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| Ragu-ragu | 14 | 36.8 |
| Setuju | 19 | 50.0 |
| Sangat Setuju | 3 | 7.9 |
| Total | 38 | 100.0 |

pers6

| | Frequency | Percent |
|--------------------|-----------|---------|
| Valid Tidak Setuju | 5 | 13.2 |
| Ragu-ragu | 8 | 21.1 |
| Setuju | 17 | 44.7 |
| Sangat Setuju | 8 | 21.1 |
| Total | 38 | 100.0 |

Correlations Persepsi Tidak Merokok

Correlations

| | | pers1 | pers2 | pers3 | pers4 | pers5 | pers6 | Mean |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| pers1 | Pearson Correlation | 1 | .698** | .428** | .395* | .257 | .294 | .689** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .007 | .014 | .119 | .073 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| pers2 | Pearson Correlation | .698** | 1 | .508** | .495** | .445** | .347* | .782** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .001 | .002 | .005 | .033 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| pers3 | Pearson Correlation | .428** | .508** | 1 | .547** | .368 | .296 | .716** |
| | Sig. (2-tailed) | .007 | .001 | | .000 | .023 | .071 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| pers4 | Pearson Correlation | .395* | .495** | .547** | 1 | .731** | .644** | .846** |
| | Sig. (2-tailed) | .014 | .002 | .000 | | .000 | .000 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| pers5 | Pearson Correlation | .257 | .445** | .368 | .731** | 1 | .715** | .755** |
| | Sig. (2-tailed) | .119 | .005 | .023 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| pers6 | Pearson Correlation | .294 | .347* | .296 | .644** | .715** | 1 | .717** |
| | Sig. (2-tailed) | .073 | .033 | .071 | .000 | .000 | | .000 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mean | Pearson Correlation | .689** | .782** | .716** | .846** | .755** | .717** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Persepsi Tidak Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 38 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 38 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .842 | 6 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| pers1 | 3.55 | .921 | 38 |
| pers2 | 3.53 | 1.006 | 38 |
| pers3 | 3.47 | 1.033 | 38 |
| pers4 | 3.32 | 1.068 | 38 |
| pers5 | 3.61 | .718 | 38 |
| pers6 | 3.74 | .950 | 38 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| pers1 | 17.66 | 13.799 | .546 | .830 |
| pers2 | 17.68 | 12.654 | .659 | .808 |
| pers3 | 17.74 | 13.118 | .562 | .829 |
| pers4 | 17.89 | 11.772 | .747 | .789 |
| pers5 | 17.61 | 14.245 | .669 | .814 |
| pers6 | 17.47 | 13.445 | .580 | .824 |

Frequencies Kebijakan Tidak Merokok

keb1

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 21 | 55.3 |
| | Setuju | 14 | 36.8 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb2

| | | Frequency | Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| | Ragu-ragu | 12 | 31.6 |
| | Setuju | 22 | 57.9 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb3

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 3 | 7.9 |
| | Ragu-ragu | 12 | 31.6 |
| | Setuju | 21 | 55.3 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb4

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 11 | 28.9 |
| | Setuju | 25 | 65.8 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb5

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| | Ragu-ragu | 18 | 47.4 |
| | Setuju | 17 | 44.7 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb6

| | | Frequency | Percent |
|-------|--------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 5 | 13.2 |
| | Ragu-ragu | 23 | 60.5 |
| | Setuju | 10 | 26.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb7

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 2 | 5.3 |
| | Ragu-ragu | 18 | 47.4 |
| | Setuju | 17 | 44.7 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb8

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 4 | 10.5 |
| | Ragu-ragu | 18 | 47.4 |
| | Setuju | 15 | 39.5 |
| | Sangat Setuju | 1 | 2.6 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb9

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 6 | 15.8 |
| | Setuju | 29 | 76.3 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

keb10

| | | Frequency | Percent |
|-------|---------------|-----------|---------|
| Valid | Tidak Setuju | 1 | 2.6 |
| | Ragu-ragu | 15 | 39.5 |
| | Setuju | 20 | 52.6 |
| | Sangat Setuju | 2 | 5.3 |
| | Total | 38 | 100.0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| keb10 | Pearson Correlation | .637** | -.117 | .157 | .167 | .375* | .134 | .506** | .247 | .281 | 1 | .488** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .485 | .345 | .317 | .020 | .422 | .001 | .135 | .087 | | .002 |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Mean | Pearson Correlation | .758** | .622** | .813** | .553** | .796** | .834** | .843** | .716** | .380* | .488** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .019 | .002 | |
| | N | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Kebijakan Tidak Merokok

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 38 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 38 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .875 | 10 |

Item Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|-------|------|----------------|----|
| keb1 | 3.45 | .645 | 38 |
| keb2 | 3.47 | .687 | 38 |
| keb3 | 3.58 | .722 | 38 |
| keb4 | 3.68 | .574 | 38 |
| keb5 | 3.45 | .645 | 38 |
| keb6 | 3.13 | .623 | 38 |
| keb7 | 3.45 | .645 | 38 |
| keb8 | 3.34 | .708 | 38 |
| keb9 | 3.84 | .547 | 38 |
| keb10 | 3.61 | .638 | 38 |

Item-Total Statistics

| | Scale Mean if Item Deleted | Scale Variance if Item Deleted | Corrected Item-Total Correlation | Cronbach's Alpha if Item Deleted |
|-------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| keb1 | 31.55 | 15.659 | .684 | .856 |
| keb2 | 31.53 | 16.256 | .512 | .869 |
| keb3 | 31.42 | 14.899 | .745 | .850 |
| keb4 | 31.32 | 17.087 | .453 | .872 |
| keb5 | 31.55 | 15.443 | .731 | .852 |
| keb6 | 31.87 | 15.361 | .783 | .848 |
| keb7 | 31.55 | 15.173 | .792 | .847 |
| keb8 | 31.66 | 15.583 | .623 | .860 |
| keb9 | 31.16 | 18.028 | .267 | .884 |
| keb10 | 31.39 | 17.218 | .366 | .879 |

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| N | | 82 | 82 | 82 |
| Normal Parameters ^a | Mean | 3.6293 | 3.6582 | 3.5976 |
| | Std. Deviation | .36158 | .57029 | .37499 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .187 | .125 | .129 |
| | Positive | .129 | .125 | .109 |
| | Negative | -.187 | -.087 | -.129 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.095 | 1.136 | 1.169 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .086 | .151 | .130 |
| a. Test distribution is Normal. | | | | |

Descriptives Merokok

Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Variance |
|------------------------|----|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Kebijakan Publik | 82 | 2.40 | 4.60 | 3.6293 | .36158 | .131 |
| Partisipasi Masyarakat | 82 | 2.33 | 4.67 | 3.6582 | .57029 | .325 |
| Persepsi Masyarakat | 82 | 2.50 | 4.50 | 3.5976 | .37499 | .141 |
| Valid N (listwise) | 82 | | | | | |

NPar Tests Merokok

Regression Merokok

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|------------------------|--------|----------------|----|
| Kebijakan Publik | 3.6293 | .36158 | 82 |
| Partisipasi Masyarakat | 3.6582 | .57029 | 82 |
| Persepsi Masyarakat | 3.5976 | .37499 | 82 |

Correlations

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Pearson Correlation | Kebijakan Publik | 1.000 | .402 | .406 |
| | Partisipasi Masyarakat | .402 | 1.000 | .216 |
| | Persepsi Masyarakat | .406 | .216 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kebijakan Publik | . | .000 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .000 | . | .025 |
| | Persepsi Masyarakat | .000 | .025 | . |
| N | Kebijakan Publik | 82 | 82 | 82 |
| | Partisipasi Masyarakat | 82 | 82 | 82 |
| | Persepsi Masyarakat | 82 | 82 | 82 |

Variables Entered/Removed^b

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------|
| 1 | Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat ^a | | . Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | .518 ^a | .268 | .250 | .31318 |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 2.841 | 2 | 1.421 | 14.483 | .000 ^a |
| | Residual | 7.749 | 79 | .098 | | |
| | Total | 10.590 | 81 | | | |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 1.704 | .370 | | 4.611 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .209 | .063 | .329 | 3.341 | .001 |
| | Persepsi Masyarakat | .323 | .095 | .335 | 3.396 | .001 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Collinearity Diagnostics^a

| Model | Dimensi on | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | |
|-------|------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | (Constant) | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
| 1 | 1 | 2.980 | 1.000 | .00 | .00 | .00 |
| | 2 | .015 | 13.960 | .06 | .96 | .15 |
| | 3 | .005 | 23.916 | .94 | .03 | .85 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|----------------|----|
| Predicted Value | 3.1396 | 4.0609 | 3.6293 | .18729 | 82 |
| Std. Predicted Value | -2.614 | 2.305 | .000 | 1.000 | 82 |
| Standard Error of Predicted Value | .035 | .113 | .057 | .019 | 82 |
| Adjusted Predicted Value | 3.1332 | 4.0668 | 3.6293 | .18726 | 82 |
| Residual | -1.22174 | .65060 | .00000 | .30929 | 82 |
| Std. Residual | -3.901 | 2.077 | .000 | .988 | 82 |
| Stud. Residual | -4.005 | 2.154 | .000 | 1.011 | 82 |
| Deleted Residual | -1.28782 | .69917 | -.00004 | .32433 | 82 |
| Stud. Deleted Residual | -4.458 | 2.206 | -.010 | 1.055 | 82 |
| Mahal. Distance | .038 | 9.484 | 1.976 | 2.065 | 82 |
| Cook's Distance | .000 | .289 | .017 | .047 | 82 |
| Centered Leverage Value | .000 | .117 | .024 | .025 | 82 |

Residuals Statistics^a

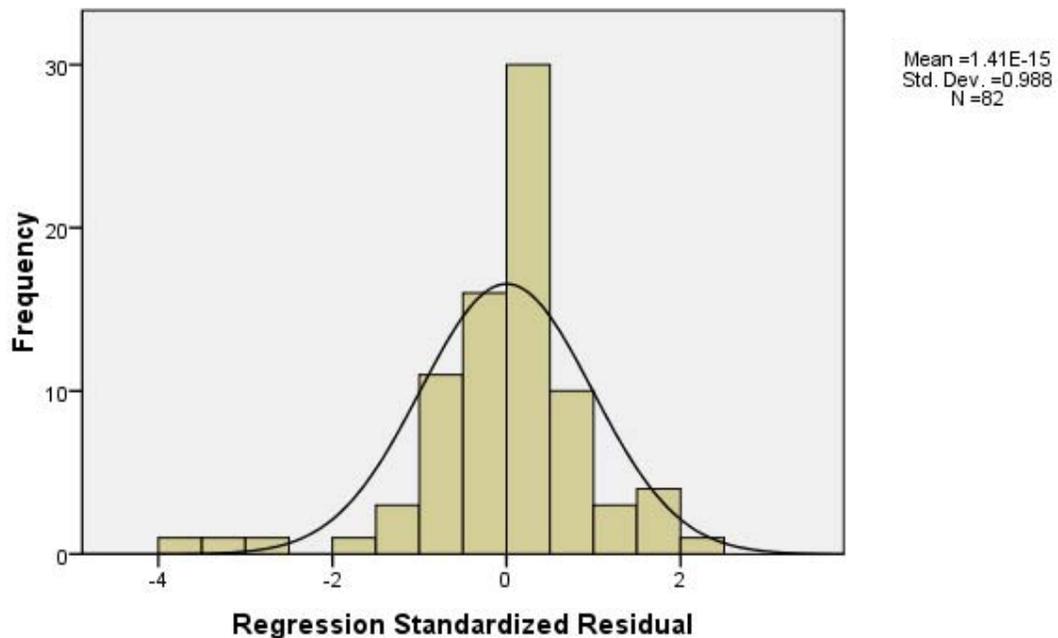
| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|----------------|----|
| Predicted Value | 3.1396 | 4.0609 | 3.6293 | .18729 | 82 |
| Std. Predicted Value | -2.614 | 2.305 | .000 | 1.000 | 82 |
| Standard Error of Predicted Value | .035 | .113 | .057 | .019 | 82 |
| Adjusted Predicted Value | 3.1332 | 4.0668 | 3.6293 | .18726 | 82 |
| Residual | -1.22174 | .65060 | .00000 | .30929 | 82 |
| Std. Residual | -3.901 | 2.077 | .000 | .988 | 82 |
| Stud. Residual | -4.005 | 2.154 | .000 | 1.011 | 82 |
| Deleted Residual | -1.28782 | .69917 | -.00004 | .32433 | 82 |
| Stud. Deleted Residual | -4.458 | 2.206 | -.010 | 1.055 | 82 |
| Mahal. Distance | .038 | 9.484 | 1.976 | 2.065 | 82 |
| Cook's Distance | .000 | .289 | .017 | .047 | 82 |
| Centered Leverage Value | .000 | .117 | .024 | .025 | 82 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

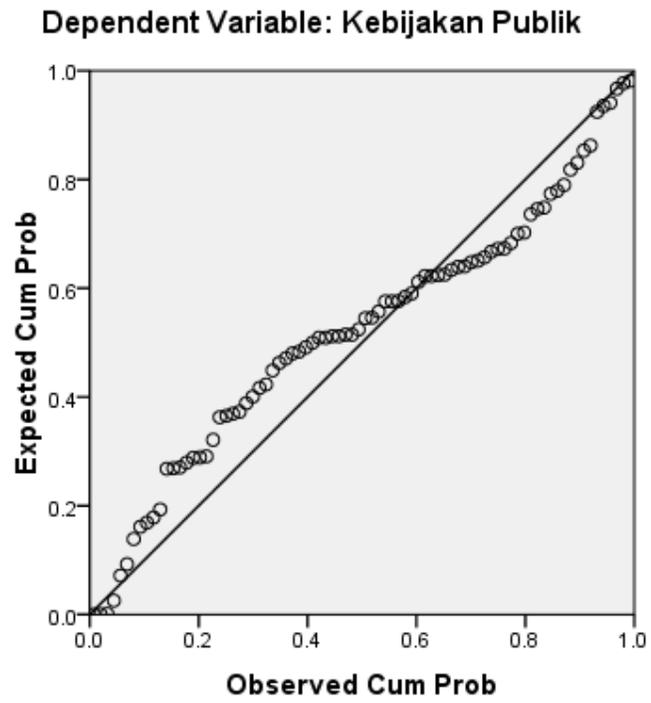
Charts

Histogram

Dependent Variable: Kebijakan Publik

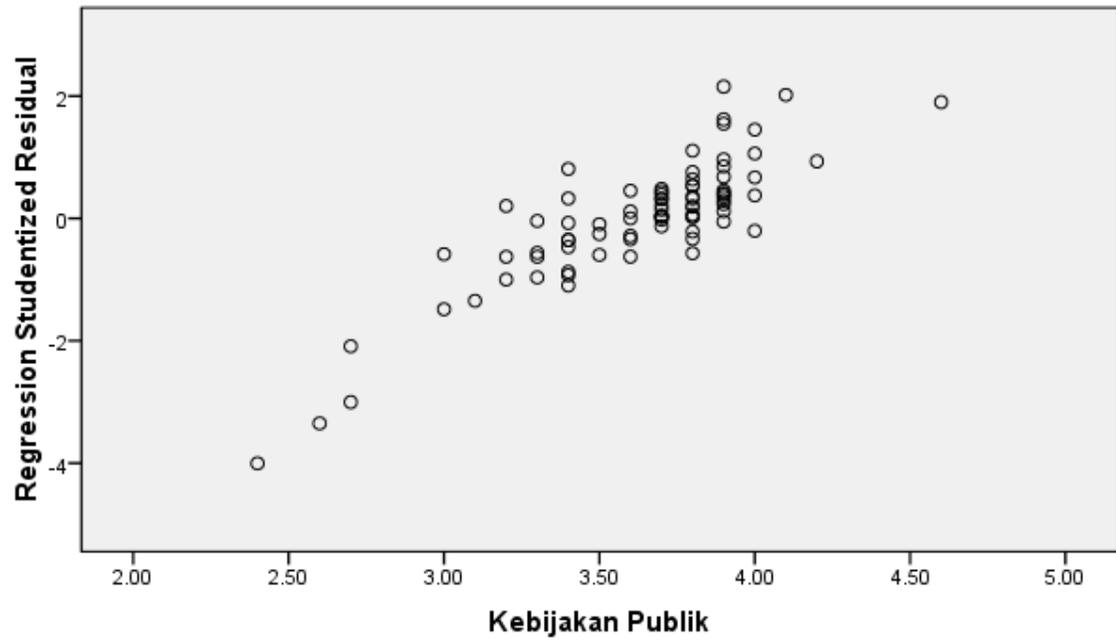


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot

Dependent Variable: Kebijakan Publik



NPar Tests Tidak Merokok

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|---------------------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| N | | 38 | 38 | 38 |
| Normal Parameters ^a | Mean | 3.5000 | 3.5355 | 3.5000 |
| | Std. Deviation | .44235 | .71517 | .51132 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .174 | .113 | .158 |
| | Positive | .147 | .113 | .158 |
| | Negative | -.174 | -.095 | -.089 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.071 | .697 | .973 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .202 | .716 | .300 |
| a. Test distribution is Normal. | | | | |

Descriptives Tidak Merokok

Descriptive Statistics

| | N | Range | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | Variance |
|------------------------|----|-------|---------|---------|--------|----------------|----------|
| Kebijakan Publik | 38 | 2.10 | 2.40 | 4.50 | 3.5000 | .44235 | .196 |
| Partisipasi Masyarakat | 38 | 2.66 | 2.17 | 4.83 | 3.5355 | .71517 | .511 |
| Persepsi Masyarakat | 38 | 2.17 | 2.33 | 4.50 | 3.5000 | .51132 | .261 |
| Valid N (listwise) | 38 | | | | | | |

Regression Tidak Merokok

Descriptive Statistics

| | Mean | Std. Deviation | N |
|------------------------|--------|----------------|----|
| Kebijakan Publik | 3.5000 | .44235 | 38 |
| Partisipasi Masyarakat | 3.5355 | .71517 | 38 |
| Persepsi Masyarakat | 3.5000 | .51132 | 38 |

Correlations

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Pearson Correlation | Kebijakan Publik | 1.000 | .782 | .847 |
| | Partisipasi Masyarakat | .782 | 1.000 | .731 |
| | Persepsi Masyarakat | .847 | .731 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kebijakan Publik | . | .000 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .000 | . | .000 |
| | Persepsi Masyarakat | .000 | .000 | . |
| N | Kebijakan Publik | 38 | 38 | 38 |
| | Partisipasi Masyarakat | 38 | 38 | 38 |

Correlations

| | | Kebijakan Publik | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Pearson Correlation | Kebijakan Publik | 1.000 | .782 | .847 |
| | Partisipasi Masyarakat | .782 | 1.000 | .731 |
| | Persepsi Masyarakat | .847 | .731 | 1.000 |
| Sig. (1-tailed) | Kebijakan Publik | . | .000 | .000 |
| | Partisipasi Masyarakat | .000 | . | .000 |
| | Persepsi Masyarakat | .000 | .000 | . |
| N | Kebijakan Publik | 38 | 38 | 38 |
| | Partisipasi Masyarakat | 38 | 38 | 38 |
| | Persepsi Masyarakat | 38 | 38 | 38 |

Variables Entered/Removed^b

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| 1 | Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat ^a | | Enter |

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .880 ^a | .775 | .762 | .21572 | 1.884 |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

ANOVA^b

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 5.611 | 2 | 2.806 | 60.292 | .000 ^a |
| | Residual | 1.629 | 35 | .047 | | |
| | Total | 7.240 | 37 | | | |

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat, Partisipasi Masyarakat

b. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .943 | .245 | | 3.846 | .000 | | |
| | Partisipasi Masyarakat | .217 | .073 | .350 | 2.981 | .005 | .866 | 1.146 |
| | Persepsi Masyarakat | .512 | .102 | .592 | 5.037 | .000 | .866 | 1.146 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Collinearity Diagnostics^a

| Model | Dimensi on | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | |
|-------|------------|------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | (Constant) | Partisipasi Masyarakat | Persepsi Masyarakat |
| 1 | 1 | 2.974 | 1.000 | .00 | .00 | .00 |
| | 2 | .019 | 12.387 | .56 | .43 | .00 |
| | 3 | .006 | 21.721 | .44 | .57 | 1.00 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

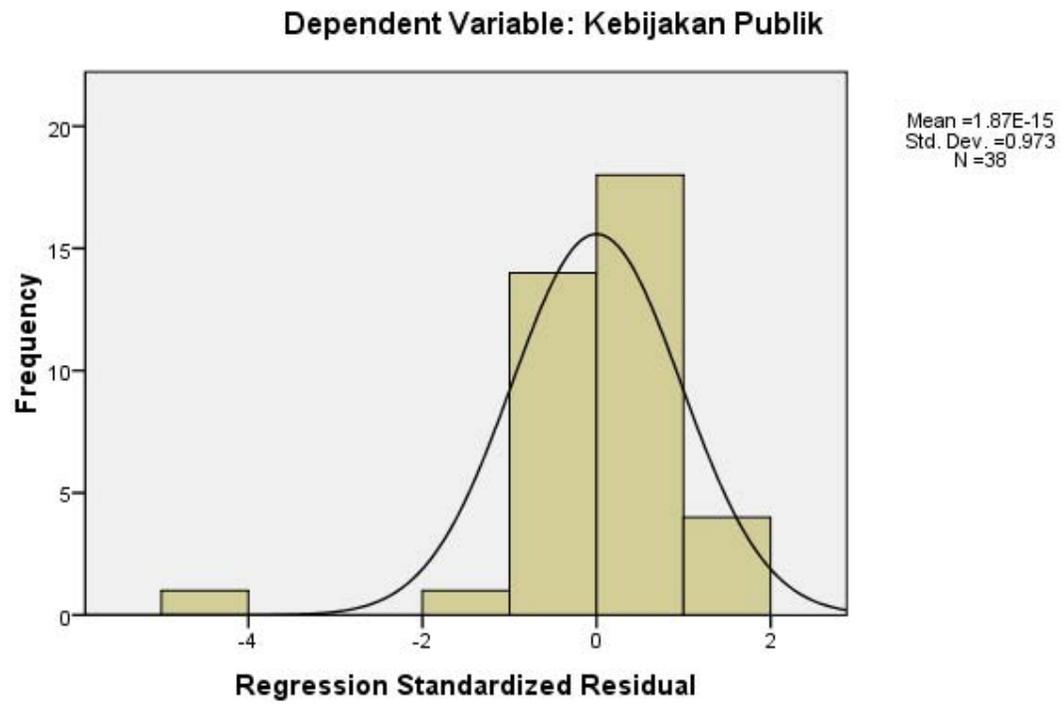
Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|----|
| Predicted Value | 2.6056 | 4.2574 | 3.5000 | .38943 | 38 |
| Std. Predicted Value | -2.297 | 1.945 | .000 | 1.000 | 38 |
| Standard Error of Predicted Value | .035 | .115 | .057 | .020 | 38 |
| Adjusted Predicted Value | 2.6481 | 4.2811 | 3.5020 | .38875 | 38 |
| Residual | -.89706 | .32963 | .00000 | .20981 | 38 |
| Std. Residual | -4.158 | 1.528 | .000 | .973 | 38 |
| Stud. Residual | -4.253 | 1.617 | -.004 | 1.012 | 38 |
| Deleted Residual | -.93849 | .36905 | -.00202 | .22745 | 38 |
| Stud. Deleted Residual | -6.031 | 1.657 | -.050 | 1.233 | 38 |
| Mahal. Distance | .005 | 9.504 | 1.947 | 2.068 | 38 |
| Cook's Distance | .000 | .279 | .029 | .054 | 38 |
| Centered Leverage Value | .000 | .257 | .053 | .056 | 38 |

a. Dependent Variable: Kebijakan Publik

Charts

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

